

**STRATEGI YANG MENDORONG KERJA SAMA INSTITUSIONAL
ANTARA KOREA SELATAN DAN ASEAN DI ERA PRESIDEN MOON**

JAE-IN

SKRIPSI



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh:

INTAN FIONA ALFIRERA

21323189

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2025

**STRATEGI YANG MENDORONG KERJA SAMA INSTITUSIONAL
ANTARA KOREA SELATAN DAN ASEAN DI ERA PRESIDEN MOON**

JAE-IN

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh

Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

INTAN FIONA ALFIRERA

21323189

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2025

HALAMAN PENGESAHAN

**Strategi yang Mendorong Kerja Sama Institusional antara Korea Selatan
dan ASEAN di Era Presiden Moon Jae-in**
Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

Pada Tanggal

21 Agustus 2025

Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Ketua Program Studi



Karina
Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.

Dewan Penguji

- 1 Hadza Min Fadhli Robby, S.I.P., M.Sc.
- 2 Ayu Heryati Naqsabandiyah, S.IP., M.A
- 3 Enggar Furi Herdianto, S.I.P., M.A.

Tanda Tangan

[Signature 1]
[Signature 2]
[Signature 3]

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

Yogyakarta, 14 Agustus 2025

A handwritten signature in black ink is written over a yellow revenue stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem, the number '10000', and the text 'METERAI TEMBEL' and 'F4A73AMX429596072'.

Intan Fiona Alfirea

KATA PENGANTAR

Dengan penuh kerendahan hati, penulis memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, Dzat Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang dengan limpahan rahmat, dan hidayah-Nya, telah memberi kekuatan, serta kesempatan hingga setiap langkah, kata, dan pemikiran dapat terhimpun menjadi karya ilmiah ini. Penulis menyadari bahwa tiada daya dan upaya selain dengan pertolongan-Nya. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai panutan dan rahmat bagi seluruh umat islam. Semoga ajaran beliau menjadi penerang jalan dalam setiap langkah hidup. Skripsi berjudul “Faktor-Faktor yang Mendorong Kerja Sama Institusional antara Korea Selatan dan ASEAN di Era Presiden Moon Jae-in” ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Islam Indonesia. Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis menyadari bahwa keberhasilan ini tidak akan terwujud tanpa doa, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan ketulusan, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat, perlindungan, dan kekuatan di setiap langkah dan Nabi Muhammad SAW yang ajarannya menjadi pedoman hidup dan sumber inspirasi.
2. Kepada bapak, ibu, adek Rizal dan adek Kiki yang cinta dan doanya telah menjadi napas dalam setiap langkah penulis. Terima kasih atas kasih sayang yang tak mengenal batas, doa yang tak pernah lelah dipanjatkan, dan pengorbanan yang tak terhitung demi melihat penulis berdiri di titik ini.

3. Kepada dosen pembimbing bapak Hadza Min Fadhli Robby, S.I.P., M.Sc. yang dengan sabar membimbing di tengah kebingungan dan kesulitan. Terima kasih atas waktu yang diluangkan, koreksi, saran, dan support sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. Kepada kaprodi Ibu Karina Utami Dewi, SIP., MA. dan seluruh dosen Program Studi Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu dan wawasan hingga titik ini.
5. Kepada sahabat-sahabat seperjuangan yang hadir sebagai keluarga kedua. Ronna Puspita Sari S.Hub.Int, Fatma Azzahra S.Hub.Int, Salsabilah Oktariani Uzainirisa S.Hub.Int, Nabila Zahra Hairunnisa Salim S.Hub.Int dan Wanda Suryaningrum S.Hub.Int yang sudah menemani penulis sejak menjadi mahasiswa baru tahun 2021 sampai saat ini. Terima kasih atas tawa yang menghibur, support serta selalu ada untuk satu sama lain. Pengalaman yang paling berharga sampai terselesaikan perkuliahan ini. *See u on top, guys!*
6. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, namun telah memberikan kontribusi dalam bentuk apapun bagi terselesaikannya skripsi ini.

Semoga segala bantuan, doa, dan dukungan yang telah diberikan mendapat balasan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAK	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Cakupan Penelitian	6
1.5 Tinjauan Pustaka	7
1.6 Kerangka Pemikiran	9
1.7 Argumen Sementara	11
1.8 Metode Penelitian	12
1.8.1 Jenis Penelitian	12
1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian	12
1.8.3 Metode Pengumpulan Data	12
1.8.4 Proses Penelitian	12
1.9 Sistematika Pembahasan	13
BAB 2	14
KERJASAMA KOREA SELATAN DENGAN ASEAN DAN KEBIJAKAN <i>NEW SOUTHERN POLICY</i>	14
2.1 Kerjasama antara Korea Selatan dan ASEAN	14
2.2 Kebijakan <i>New Southern Policy</i> oleh Moon Jae-in	20
BAB 3	29
IMPLEMENTASI LIMA PILAR <i>MIDDLE POWER ACTIVISM</i> KOREA SELATAN DALAM KERJA SAMA DENGAN ASEAN ERA PRESIDEN MOON JAE-IN	29
3.1 Kapasitas yang dimiliki oleh Korea Selatan	29
3.2 Pendekatan Presiden Moon Jae-in terhadap ASEAN	35
3.3 Kredibilitas dalam kerja sama Korea Selatan dengan ASEAN	40
BAB 4	46
PENUTUP	46

4.1 Kesimpulan	46
4.2 Rekomendasi	48
DAFTAR PUSTAKA	49

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis strategi diplomasi Korea Selatan sebagai *middle power* dalam membangun kerja sama institusional dengan ASEAN pada era Presiden Moon Jae-in (2017–2022) melalui kebijakan *New Southern Policy* (NSP) dan pengembangannya, *New Southern Policy Plus* (NSP Plus). Upaya ini dilatarbelakangi kebutuhan Korea Selatan untuk mengurangi ketergantungan pada empat kekuatan besar tradisional (Amerika Serikat, Tiongkok, Jepang, dan Rusia) serta memperluas jangkauan diplomasi ke Asia Tenggara yang memiliki nilai strategis dan ekonomi tinggi. Dengan menggunakan kerangka *middle power activism*, penelitian ini menekankan tiga dimensi kapasitas, kreativitas, dan kredibilitas sebagai landasan analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Korea Selatan mampu mengoptimalkan peran institusi resmi, merancang inisiatif diplomasi inovatif sesuai kebutuhan kawasan, dan membangun kepercayaan mitra melalui konsistensi kebijakan serta pemanfaatan *soft power*. Secara keseluruhan, kerja sama ini dipahami bukan sekadar kepentingan pragmatis jangka pendek, melainkan strategi jangka panjang untuk memperkuat legitimasi, pengaruh, dan posisi Korea Selatan sebagai aktor menengah di Asia Tenggara.

Kata-kata kunci: ASEAN, kerja sama institusional, Korea Selatan, *middle power*, *New Southern Policy*

ABSTRACT

This study examines South Korea's middle power diplomacy strategy in developing institutional cooperation with ASEAN during President Moon Jae-in's administration (2017–2022) through the New Southern Policy (NSP) and its expansion, the New Southern Policy Plus (NSP Plus). This policy shift was driven by South Korea's need to reduce reliance on its four traditional major partners the United States, China, Japan, and Russia, while expanding diplomatic engagement with Southeast Asia, a region of high economic potential and strategic importance. Using the framework of middle power activism, the research highlights three dimensions capacity, creativity, and credibility as analytical pillars. The findings show that South Korea effectively utilized formal institutions, introduced innovative diplomatic initiatives tailored to ASEAN's needs, and built trust through policy consistency and the strategic use of soft power. Overall, this cooperation reflects not only short-term pragmatic interests but also a long-term strategy to strengthen South Korea's legitimacy, influence, and position as a credible middle power in Southeast Asia.

Keywords: ASEAN, institutional cooperation, middle power, New Southern Policy, South Korea

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Asia Tenggara (ASEAN) dipandang sebagai kawasan dengan signifikansi strategis global yang terus meningkat, sehingga banyak negara besar maupun kekuatan menengah menjadikannya mitra utama dalam diplomasi, ekonomi, dan keamanan. Asia Tenggara dijadikan mitra strategis karena memiliki keunggulan multidimensi yang tidak mudah ditandingi kawasan lain. Dari sisi geopolitik dan maritim, kawasan ini berperan sebagai jalur utama perdagangan global, di mana Selat Malaka menjadi titik penting yang menghubungkan Samudra Hindia dengan Laut Cina Selatan. Jalur ini sangat vital bagi arus energi dan perdagangan internasional, termasuk bagi Korea Selatan, karena lebih dari 75% impor minyaknya dari Timur Tengah melewati rute tersebut. Oleh karena itu, setiap potensi gangguan, baik akibat konflik, aksi perompakan, maupun bencana alam dapat menimbulkan dampak sistemik terhadap perekonomian Asia Timur, khususnya Korea Selatan (Indraswari 2022). Selain itu, Selat Malaka merupakan salah satu titik penyempitan pelayaran (*chokepoint*) utama di dunia yang transit vessel mencapai jutaan ton barang, memperkuat pentingnya stabilitas kawasan.

Dari perspektif ekonomi, Asia Tenggara memiliki daya tarik yang lebih menonjol dibanding kawasan lain, karena menawarkan pasar dengan pertumbuhan pesat, populasi besar, serta kelas menengah yang terus meningkat. Dengan jumlah penduduk sekitar 660 juta jiwa dan PDB (Produk Domestik Bruto) kolektif sekitar USD 3,6 triliun pada 2022, ASEAN telah bertransformasi menjadi salah satu pusat

pertumbuhan ekonomi baru dunia. Kawasan ini diproyeksikan tumbuh rata-rata 4% per tahun hingga 2040, ditopang oleh struktur demografis yang muda dan peningkatan signifikan kelas menengah. Data *World Economic Forum* memperkirakan jumlah rumah tangga kelas menengah di ASEAN hampir berlipat ganda, dari 30 juta pada 2019 menjadi 57 juta pada 2030. Kondisi tersebut menciptakan pasar konsumsi domestik yang besar dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat posisi ASEAN sebagai mitra strategis pilihan bagi Korea Selatan (Lee dan Ro 2021).

Mengapa ASEAN begitu penting bagi Korea Selatan? Yang paling penting, wilayah-wilayah yang dulunya berada di pinggiran perekonomian dunia kini menjadi salah satu wilayah dengan pertumbuhan ekonomi paling dinamis di dunia. ASEAN juga terus berkembang secara diplomatis dan telah menjadi organisasi antar pemerintah regional. ASEAN mengundang negara-negara kuat seperti Amerika Serikat dan Tiongkok untuk berpartisipasi dalam Konferensi Tingkat Tinggi Asia Timur setiap tahun guna meningkatkan perannya di kancah internasional. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa semua negara besar berupaya membujuk ASEAN untuk mendapatkan dukungannya. Negara-negara seperti Amerika Serikat, India, dan Australia, khususnya Tiongkok, yang mengusulkan inisiatif “*One Belt, One Road*”, telah menginvestasikan banyak sumber daya di kawasan ini (Wongi 2021).

Presiden Moon Jae-in memandang ASEAN bukan sekadar sebagai mitra dagang atau negara penerima bantuan pembangunan, melainkan sebagai platform strategis yang memungkinkan Korea Selatan mempertegas posisinya sebagai kekuatan menengah (*middle power*) yang mandiri, tak lagi bergantung penuh pada

Tiongkok atau Jepang (Botto 2021). Semua negara pasti memiliki tujuan masing-masing. Kepentingan Nasional adalah tujuan terpenting dalam hubungan internasional dikarenakan peran penting negara dalam mengatur hubungan internasional. Kebijakan tertentu juga ditetapkan dan didukung oleh kepentingan nasional (Putra dan Prinanda 2023). Korea Selatan secara khusus menjadikan *ASEAN Member States* sebagai kriteria utama dalam penerapan kebijakan kerjasama Korea Selatan dengan ASEAN (Ha dan Ong 2020).

Pemilihan era kepemimpinan Presiden Moon Jae-in sebagai fokus penelitian berlandaskan pertimbangan historis maupun akademis yang berkaitan dengan perkembangan hubungan Korea Selatan dengan ASEAN. Pada masa pemerintahannya, Korea Selatan meluncurkan sebuah kebijakan sebagai kerangka diplomasi komprehensif yang secara khusus menempatkan ASEAN sebagai mitra strategis utama. Kebijakan ini menjadi inisiatif pertama yang secara eksplisit menyetarakan posisi ASEAN dengan mitra besar lain, sekaligus membuka peluang bagi penguatan kerja sama institusional di berbagai bidang, mulai dari politik, ekonomi, keamanan, hingga isu-isu kontemporer seperti kesehatan, transformasi digital, dan pembangunan berkelanjutan (Indraswari 2022). Kebijakan pada periode Moon Jae-in ini telah memberikan landasan baru yang lebih terstruktur dan terinstitusionalisasi bagi hubungan Korea Selatan dengan ASEAN.

Korea Selatan adalah salah satu negara di Asia Timur yang dikenal luas karena pencapaian ekonominya yang pesat, sempat mengalami kesulitan membangun kembali setelah Jepang meninggalkannya, mengalami kerusakan 40% pada sektor pendukungnya. Korea Selatan telah berubah menjadi apa yang sekarang kita kenal setelah sebelumnya menjadi negara Asia kedua termiskin setelah India.

Pertumbuhan ekonomi Korea Selatan sejak kemerdekaannya lantas menjadi contoh dari berhasilnya pembangunan ekonomi nasional dalam waktu yang tergolong singkat (Alda Syahmaya Hasty 2023). Selama bertahun-tahun, perekonomian Korea Selatan sangat bergantung pada negara-negara besar. Namun, seiring dengan berubahnya dinamika dalam tatanan internasional, seperti proteksionisme Amerika Serikat yang meningkat di bawah kepemimpinan Donald Trump, perluasan pengaruh Tiongkok di Asia, dan perang dagang AS-China, Presiden Moon Jae-in telah mengambil keputusan untuk mengubah perekonomian Korea Selatan (Pasha dan Paksi 2022).

Jumlah perdagangan antara Korea Selatan dan ASEAN telah meningkat pesat sekitar 15 kali lipat, dari USD 8 miliar di tahun 1989 jadi USD 121 miliar di tahun 2016. Sebagai hasil, Korea Selatan menjadi mitra dagang terbesar kelima di ASEAN setelah Cina, Amerika Serikat (AS), Uni Eropa (UE), dan Jepang. Di sisi lain, ASEAN bahkan melampaui Cina, Jepang, AS, dan UE menempati posisi sebagai mitra dagang terbesar kedua Korea Selatan setelah Tiongkok. Walaupun volume perdagangan bilateral meningkat pesat, para negara anggota ASEAN sering mengalami defisit perdagangan yang sangat besar dengan Korea Selatan, meningkat dari USD 3,8 miliar menjadi USD 36,1 miliar antara tahun 2000 dan 2016 (Truong dkk. 2019).

Presiden Moon Jae-in secara konsisten memanfaatkan berbagai kesempatan untuk menegaskan peran Korea Selatan selaku kekuatan menengah di kancah global. Hal ini tercermin dari penyusunan *First Basic Plan on Public Diplomacy Korea* sebagai suatu fondasi bagi diplomasi publik, hingga penyelenggaraan Olimpiade Musim Dingin 2018 yang digunakan untuk menunjukkan kepercayaan

diri dan kapabilitas nasional Korea Selatan. Dalam waktu satu tahun masa kepemimpinannya, Moon Jae-in berhasil memperkuat posisi Korea Selatan sebagai negara dengan status *middle power* melalui pendekatan diplomasi publik. Rencana konkret telah dibuat dan partisipasi dari aktor non-negara dan masyarakat domestik maupun internasional telah meningkat (Adriana 2020).

Kerja sama Korea Selatan dengan ASEAN dapat dikategorikan sebagai bentuk kerja sama institusional, karena tidak sekadar terbatas pada hubungan bilateral yang pragmatis atau bersifat ad hoc, melainkan berkembang di atas dasar kelembagaan yang formal dan mengikat. Sejak resmi menjadi mitra dialog penuh ASEAN pada 1991, hubungan kedua pihak semakin diperdalam melalui beragam mekanisme resmi. Dalam kerja sama institusional, para pihak sepakat membentuk struktur kelembagaan, forum formal, dan perjanjian yang mengikat, sehingga hubungan yang terjalin menjadi lebih konsisten, berkesinambungan, serta memiliki legitimasi. Kehadiran institusi membuat kerja sama lebih stabil dan mampu bertahan meskipun terjadi perubahan kepentingan politik jangka pendek (Keohane 1984).

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana Korea Selatan mendorong kerja sama institusional dengan ASEAN melalui *New Southern Policy* era Presiden Moon Jae-in?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mengkaji secara menyeluruh alasan strategis yang mendorong Korea Selatan untuk memperkuat dan memperdalam hubungannya dengan ASEAN selama masa kepemimpinan Presiden Moon Jae-in.
2. Mencakup kajian tentang kepentingan nasional Korea Selatan.
3. Menguraikan kebijakan luar negeri serta strategi Korea Selatan dalam memperluas kerja sama dengan negara-negara Asia Tenggara, mencakup bidang diplomasi, ekonomi, budaya, serta bentuk kolaborasi bilateral.

1.4 Cakupan Penelitian

Penelitian "Strategi yang Mendorong Kerjasama Institusional antara Korea Selatan dan ASEAN di Era Presiden Moon Jae-in" mencakup beberapa aspek. Ialah penelitian ini terbatas pada hubungan Korea Selatan dengan ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*). Lalu penelitian ini terbatas pada waktu, yaitu masa kepemimpinan Presiden Moon Jae-in. Ini juga menganalisis topik atau motivasi yang mendorong Korea Selatan untuk membangun dan memperdalam kerjasama dengan negara-negara ASEAN. Selain itu, penelitian ini melihat kebijakan dan strategi luar negeri Korea Selatan yang digunakan untuk meningkatkan hubungan dengan ASEAN, serta pencapaian juga dampak dari upaya Korea Selatan untuk membangun kerjasama dengan ASEAN. Penelitian ini juga berusaha mengidentifikasi peluang yang terkait dengan membangun kerjasama dengan negara-negara ASEAN.

1.5 Tinjauan Pustaka

Jurnal pertama berjudul “*New Emphasis Needed: South Korea’s New Southern Policy and ASEAN*” pada tahun 2020 oleh Lee Jaehyon berbicara mengenai tiga pilar utama NSP, ialah *People, Peace, dan Prosperity*. Menurut Lee Jaehyon, dari ketiga pilar tersebut, aspek *Peace* atau perdamaian yang berkaitan dengan politik dan keamanan menjadi elemen yang paling kurang berkembang dalam implementasinya. Ia menyoroti kurangnya kepercayaan strategis dari ASEAN terhadap Korea Selatan, yang menyebabkan pilar politik-keamanan tertinggal dibandingkan dimensi ekonomi dan sosial budaya. Lee Jaehyon merekomendasikan perlunya penyesuaian dan perluasan fokus NSP agar tidak sekadar menjadi kebijakan ekonomi, tetapi juga mencakup kerja sama keamanan dan perdamaian regional yang lebih luas. Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan perhatian pada kepentingan utama dibalik perumusan kebijakan luar negeri NSP, khususnya terhadap ASEAN sebagai mitra utama Korea Selatan. Perbandingan yang dapat dilihat adalah bahwa jika Lee Jaehyon menyoroti kelemahan implementatif dari NSP, maka penelitian ini berusaha menjelaskan bagaimana dan mengapa kerja sama institusional dibentuk, dengan menganalisis faktor-faktor pendorongnya secara struktural dan strategis (Jaehyon 2020).

Jurnal kedua berjudul “*New Southern Policy: Korea’s New Found Ambitions in Search of Strategic Economy*” pada tahun 2021 oleh Choi Wongi Membahas salah satu kebijakan luar negeri paling aktif dan ambisius yang dijalankan selama masa pemerintahan Presiden Moon Jae-in, yaitu *New Southern Policy* (NSP). Dalam tulisan ini dijelaskan bahwa NSP merupakan langkah Korea Selatan untuk mengurangi ketergantungan terhadap dua kekuatan besar dunia,

Amerika Serikat dan Tiongkok, dengan mencari mitra strategis baru di Asia Tenggara dan India. Choi menyebut bahwa NSP bukan hanya instrumen diplomasi ekonomi biasa, tetapi merupakan upaya strategis Korea Selatan untuk mencapai otonomi ekonomi dan politik yang lebih besar melalui diversifikasi kemitraan. Melalui pendekatan ini, Korea Selatan berupaya membangun jaringan regional yang kokoh dan memperluas pengaruhnya di Asia Selatan dan Tenggara. Namun, Choi Wongi juga menggarisbawahi bahwa meskipun Korea Selatan telah menunjukkan ambisi strategis, tantangan geopolitik tetap menjadi hambatan dalam mewujudkan dominasi regional. Dalam penelitian ini, penulis ingin menjelaskan alasan di balik pembentukan NSP di Asia Tenggara sebagai respons atas dinamika global, serta melihat bagaimana kebijakan ini digunakan untuk mengembangkan strategi ekonomi baru yang tidak terjebak dalam konflik dagang antara AS dan Tiongkok (Wongi 2021).

Jurnal ketiga berjudul *“South Korea’s Interest in ASEAN+1: New Southern Policy and Peacebuilding”* yang ditulis oleh Pradityo Rahmadanu mengevaluasi bagaimana Korea Selatan menggunakan NSP sebagai platform untuk memperkuat hubungan dalam format ASEAN+1 dan berkontribusi pada agenda pembangunan perdamaian (*peacebuilding*) di kawasan Asia Tenggara. Fokus utama jurnal ini adalah bahwa NSP tidak hanya menargetkan kerja sama ekonomi, tetapi juga membawa nilai-nilai *soft power* Korea Selatan ke dalam hubungan dengan ASEAN melalui diplomasi publik, bantuan pembangunan (ODA), serta kerja sama budaya dan sosial. Pradityo Rahmadanu menekankan bahwa Korea Selatan telah menunjukkan komitmen politik yang nyata terhadap ASEAN dengan membentuk Biro ASEAN dan Asia Tenggara, meningkatkan jumlah diplomat yang ditugaskan,

dan memperluas investasi di kawasan ini. Hal ini mencerminkan transformasi hubungan bilateral ke arah yang lebih menyeluruh dan institusional. Dalam konteks penelitian ini, penulis mengkaji lebih dalam mengenai bentuk dan motivasi kerja sama menyeluruh antara Korea Selatan dan ASEAN di masa kepemimpinan Presiden Moon Jae-in, dalam rangka memperkuat posisi Korea Selatan sebagai negara kekuatan menengah yang diperhitungkan di kancah internasional (Pradityo 2022).

1.6 Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan *Middle Power Activism Theory* yang dikembangkan dalam jurnal *Cycles of Middle Power Activism: Constraint and Choice in Australian and Canadian Foreign Policy* oleh John Ravenhill pada tahun 1998, Penulis mengambil tiga elemen untuk menganalisis dalam penelitian ini, yaitu kapasitas (*capacity*), kreativitas (*creativity*), dan kredibilitas (*credibility*) (Ravenhill 1998).

Dalam teori *middle power*, kapasitas (*Capacity*) tidak lagi dipahami semata sebagai kekuatan material seperti militer besar atau ekonomi raksasa, melainkan lebih pada kemampuan diplomasi dan birokrasi yang dimiliki suatu negara. Negara *middle power* umumnya memiliki kementerian luar negeri dan korps diplomatik yang profesional, mampu melakukan analisis mendalam, memiliki jaringan internasional yang luas, serta cukup banyak kedutaan untuk menyebarkan gagasan dan memengaruhi pihak lain. Evans & Grant (1991) juga menekankan bahwa kapasitas *middle power* ditentukan oleh “energi dan ketahanan” birokrasi serta diplomatnya dalam mendorong ide kebijakan agar dapat dijalankan secara

konsisten. Jadi, *capacity* dalam konteks ini dapat dipahami sebagai kekuatan diplomasi, kemampuan analisis, serta daya tahan institusional yang membuat suatu negara tetap bisa aktif berperan di sistem internasional meski tidak memiliki sumber daya sebesar negara adidaya (*great powers*) (Ravenhill 1998).

Kreativitas (*Creativity*) dipahami sebagai kemampuan negara menengahkan untuk menutupi keterbatasan material dengan ide, diplomasi, dan inovasi kebijakan. Karena tidak memiliki kekuatan militer atau ekonomi sebesar negara adidaya (*great power*), *middle power* berperan melalui dua bentuk kepemimpinan: kepemimpinan wirausaha (*entrepreneurial leadership*) dan kepemimpinan intelektual (*intellectual leadership*). Kepemimpinan wirausaha merujuk pada keterampilan negosiasi untuk membingkai isu agar lebih mudah disepakati serta merancang paket kompromi yang dapat diterima berbagai pihak. Sementara itu, kepemimpinan intelektual adalah kemampuan menciptakan gagasan, konsep, atau kerangka baru yang bisa mempengaruhi cara pandang negara lain dalam proses negosiasi. Ravenhill menegaskan bahwa kreativitas sering muncul ketika kekuatan besar menemui jalan buntu, sehingga *middle power* berperan sebagai broker netral yang menawarkan solusi tengah. Evans & Grant (1991) menambahkan bahwa *middle power* memimpin “bukan dengan otoritas paksa, melainkan dengan kekuatan ide.” Dengan demikian, kreativitas menjadi modal penting bagi *middle powers* untuk menegosiasikan solusi, membangun konsensus, dan menjaga posisi mereka tetap relevan dalam sistem internasional, meski secara material berada di bawah *great power* (Ravenhill 1998).

Kredibilitas (*Credibility*) menjadi faktor penting yang membedakan *middle power* dari *great power* atau *small power*. Dalam kerangka *Middle Power Activism*,

AJIA (*Asian Journal of International Affairs*) menjelaskan bahwa kredibilitas tidak hanya berkaitan dengan kemampuan diplomasi, tetapi juga dengan sejauh mana sebuah negara mencerminkan norma dan nilai yang berlaku, baik di dalam negeri maupun di tingkat internasional. Sebuah *middle power* dinilai memiliki kredibilitas ketika kebijakan dan prinsip domestiknya selaras dengan sikap serta komitmennya di panggung global. Keselarasan ini menumbuhkan rasa percaya dari negara lain, karena *middle power* tersebut dipandang tidak hanya berorientasi pada kepentingan nasional, tetapi juga menghormati aturan, etika, serta standar internasional. Dengan demikian, kredibilitas mencakup legitimasi di level domestik maupun internasional yang saling menguatkan (Ravenhill 1998).

1.7 Argumen Sementara

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan sementara bahwa kerja sama institusional Korea Selatan dengan ASEAN pada masa Presiden Moon Jae-in merupakan bagian dari strategi untuk memperkuat posisi Korea Selatan di kawasan. Inisiatif ini tidak hanya didorong oleh kepentingan ekonomi dan politik luar negeri, tetapi juga oleh upaya Korea Selatan untuk menegaskan identitasnya sebagai *middle power* yang memiliki kapasitas tawar, inovasi diplomatik, serta kredibilitas di mata internasional. Dengan demikian, dapat diasumsikan bahwa kerja sama institusional yang dijalankan melalui *New Southern Policy* dan *New Southern Policy Plus* merefleksikan strategi Korea Selatan dalam memadukan kemampuan, kreativitas, dan konsistensi diplomasi. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri tersebut tidak sekadar berorientasi pragmatis, tetapi juga menjadi instrumen diplomasi untuk memperluas pengaruh

sekaligus memperkuat posisi Korea Selatan dalam tatanan regional Asia Tenggara.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Di penelitian yang penulis ambil, untuk memberi suatu gambaran mendalam terkait gejala, masalah, peristiwa, fakta, dan realitas. Penulis memilih penelitian bermetode kualitatif untuk mencari sumber atau data dari penelitian sebelumnya, seperti jurnal, buku, artikel, dan lainnya.

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Selanjutnya subjek dan objek yang dipakai di penelitian penulis ialah Korea Selatan selaku salah satu aktor dalam hubungan internasional digunakan sebagai subjek dan kerjasama institusional merupakan objek dalam penelitian yang sedang diteliti penulis.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Penulis memakai metode analisis deskriptif komparatif untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber sekunder untuk membantu memperkuat argumen dalam penelitian ini. Mereka mengumpulkan data dengan memeriksa jurnal, buku, dan berbagai web resmi yang relevan.

1.8.4 Proses Penelitian

Penulis memulai rangkaian penelitian dengan pengumpulan data. Hal ini dilakukan dengan menggunakan jaringan internet, membaca dan mengunduh literatur, jurnal, dan laporan yang relevan. Setelah pengumpulan data selesai, penulis memilih data untuk menunjukkan relevansi studi kasus dengan

menggunakan kerangka pemikiran yang dipilih. Hasil pemilihan data membawa data ke dalam narasi, di mana mereka disusun dalam bab dan/atau subbab tertentu.

1.9 Sistematika Pembahasan

Untuk membantu penulis menyusun dan menguraikan masalah yang dibahas dalam skripsi ini, pembahasan di bab ini disusun secara sistematis:

Bab pertama memberikan penjelasan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan cakupan penelitian. Ini juga mencakup tinjauan literatur, kerangka pemikiran, argumen sementara, metode, lalu sistematika penelitian. Lalu bab dua penulis akan membahas tentang sejarah hubungan Korea Selatan dan ASEAN dalam membangun hubungan Institusional, yaitu diplomasi presidensial, peningkatan kerjasama ekonomi dan kolaborasi di bidang keamanan. Pada bab tiga penulis akan menjelaskan terkait Analisis hubungan Korea Selatan dalam membangun hubungan Institusional dengan ASEAN pada era Presiden Moon Jae-in melalui teori *Middle Power Activism* oleh John Ravenhill. Bab empat mengandung kesimpulan dan inti dari analisis yang telah penulis kerjakan.

BAB 2

KERJASAMA KOREA SELATAN DENGAN ASEAN DAN KEBIJAKAN *NEW SOUTHERN POLICY*

2.1 Kerjasama antara Korea Selatan dan ASEAN

Sejak akhir tahun 1980-an, Korea Selatan telah menjalin hubungan dengan ASEAN. Banyak hal telah terjadi selama kerja sama ini. Pada awal kolaborasi, Korea Selatan menjadi mitra dialog sektoral ASEAN saat masih dianggap sebagai negara berkembang pada tahun 1989. Dalam Konferensi Tingkat Menteri ASEAN ke-24 yang berlangsung di Kuala Lumpur pada tahun 1991, Korea Selatan secara resmi ditetapkan sebagai mitra dialog ASEAN. Pada tahun yang sama, kedua pihak mulai meninjau dan merumuskan rencana perluasan kerja sama di berbagai sektor, mencakup bidang politik, ekonomi, keamanan, sosial, dan budaya (Alda Syahmaya Hasty 2023). ASEAN dan Korea Selatan telah bekerja sama. ASEAN menetapkan Korea Selatan sebagai mitra dialog karena dinilai memiliki potensi untuk menjadi salah satu pilar dalam integrasi ekonomi Asia serta berperan sebagai penghubung antara ASEAN dan negara-negara besar di Asia lainnya, seperti India dan Tiongkok (Dermawan dan Rohmaniah 2019).

ASEAN-Korea Cooperation Fund (AKCF) didirikan pada tahun 1990, menjadi pilar utama dalam memperkuat kerja sama dan solidaritas regional ASEAN dan Korea Selatan. Hingga kini, AKCF telah membiayai lebih dari 456 proyek senilai USD 174 juta di bidang-bidang prioritas yang disepakati bersama, seperti pendidikan, pelatihan, budaya, pariwisata, kesehatan, ketahanan ekonomi, lingkungan, keamanan, dan perdamaian. Melalui kolaborasi di sektor-sektor ini

(Mission of the Republic of Korea to ASEAN, t.t.-a). Pada tahun 1994, *ASEAN Regional Forum* (ARF) didirikan atas inisiatif ASEAN selaku wadah bagi negara-negara peserta untuk berdialog dan berkonsultasi mengenai isu-isu politik dan keamanan kawasan. Forum ini bertujuan mencapai kesepakatan bersama dalam mengurangi potensi ancaman terhadap stabilitas dan keamanan regional. Dalam pelaksanaannya, ASEAN memegang peran sebagai penggerak utama ARF. Forum ini merupakan satu-satunya platform antar-pemerintah yang melibatkan seluruh kekuatan besar di kawasan Asia Pasifik serta aktor global lainnya seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Jepang, Uni Eropa, dan Rusia (Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Pemerintah Australia, t.t.).

ARF menerapkan pendekatan keamanan yang menyeluruh (*comprehensive security*), yang tidak hanya mencakup dimensi militer dan keamanan konvensional, tetapi juga melibatkan aspek politik, ekonomi, sosial, serta berbagai isu keamanan lainnya, termasuk ancaman non-tradisional. Jumlah negara yang berpartisipasi dalam ARF adalah 27 negara, termasuk seluruh negara anggota ASEAN yaitu Brunei Darussalam, Laos, Kamboja, Vietnam, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Singapura, Filipina, dan Thailand. 10 negara Mitra Wicara ASEAN yaitu Korea Selatan, China, Jepang, Amerika Serikat, Kanada, India, Selandia Baru, Rusia, dan Uni Eropa, dan beberapa negara di wilayah sekitarnya, seperti Mongolia, Korea utara, Papua Nugini, Pakistan, Bangladesh, Timor-Leste, dan Sri Lanka (Dhanny, t.t.).

Krisis tahun 1997 menyadarkan negara-negara di kawasan akan pentingnya memperkuat kerja sama regional guna menghadapi gejolak ekonomi global. Sebagai tindak lanjut atas kebutuhan koordinasi tersebut, ASEAN bersama tiga

mitra regionalnya yaitu Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan membentuk kerangka kerja ASEAN+3 (*ASEAN Plus Three*) sebagai wadah untuk saling memberikan dukungan dalam menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan kawasan (Jaehyon 2019). Hubungan tersebut belum maksimal karena Korea Selatan memiliki tugas di luar Asia Tenggara. Awalnya, kerja sama ini dibentuk untuk merespons krisis yang melanda secara merata di kawasan Asia serta memperkuat *self-help* dan *support mechanism*. Beberapa tahun berikutnya, kerja sama antara negara-negara ASEAN dan Asia Timur berkembang ke berbagai sektor lainnya. Kemitraan ASEAN+3 kini mencakup tidak hanya aspek sosial dan ekonomi, tetapi juga memiliki signifikansi strategis dalam bidang politik dan keamanan (Ringga dkk. 2018).

Kerja sama ASEAN+3 mencakup berbagai sektor seperti perdagangan, investasi, keuangan, perbankan, transfer teknologi, industri, pertanian, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), ilmu pengetahuan, teknologi, dan pariwisata. Keberhasilan kerja sama ini tercermin melalui pembentukan *ASEAN Plus Three Macroeconomic Research Office* (AMRO), *ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve* (APTERR), *Chiang Mai Initiative Multilateralization* (CMIM), serta penandatanganan Nota Kesepahaman (*Memorandum of Cooperation/MoC*) *ASEAN Plus Three* dalam bidang kerja sama pariwisata. Dalam Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN+3 ke-20 yang diselenggarakan di Manila, Filipina, pada 14 November 2017, para pemimpin negara ASEAN+3 menegaskan kembali komitmen mereka untuk menjadikan ASEAN+3 sebagai alat yang dapat membantu menciptakan perdamaian, keamanan, dan kesejahteraan di wilayah tersebut. Ini dilakukan sebagai bagian dari pelaksanaan Visi Masyarakat ASEAN 2025 (Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia 2023).

Pada awal tahun 2000-an, hubungan resmi antara ASEAN dan Korea Selatan semakin erat. Selanjutnya, dibentuk *ASEAN-Korea Free Trade Area* (AKFTA), yaitu suatu bentuk kerja sama perdagangan internasional Korea Selatan dan negara-negara anggota ASEAN. Inisiatif ini bertujuan untuk mendorong perdagangan bebas melalui pengurangan berbagai hambatan, termasuk tarif dan hambatan non-tarif. Perawatan preferensial akan diberikan pada tiga bidang: barang, investasi, dan jasa. Tujuan dari preferensi ini adalah untuk mempercepat aliran barang, investasi, dan jasa ke negara anggota. Oleh karena itu, jika tujuan tersebut tercapai, kawasan perdagangan bebas dapat dibentuk (Alunaza dkk. 2023). Penandatanganan AKFTA dilakukan dalam Konferensi Tingkat Tinggi Korea Selatan-ASEAN ke-8 yang diselenggarakan di Vientiane, Laos, pada bulan November 2004. “*Joint Declaration on Comprehensive Cooperation Partnership between ASEAN and Korea, establishing ASEAN-Korea Free Trade Area*” disepakati oleh pemerintahan negara anggota ASEAN, Korea Selatan dan para pemimpin negara sebagai landasan hukum untuk pembentukan AKFTA.

Para Menteri Ekonomi ASEAN dan Korea Selatan menandatangani Perjanjian Penyelesaian Sengketa dalam kerangka AKFTA pada 13 Desember 2005 di Kuala Lumpur, Malaysia. Di tahun yang sama, disepakati *ASEAN-ROK Plan of Action* (POA) pertama sebagai bentuk komitmen untuk memperkuat kerja sama di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Kemudian, kesepakatan mengenai perdagangan barang dalam AKFTA juga diteken pada 24 Agustus 2006 di kota yang sama. Namun, Kesepakatan Jasa AKFTA ditandatangani di Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN 2007 di Singapura, dan Persetujuan Investasi Korea Selatan dan ASEAN ditandatangani pada Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN 2009

di Pulau Jeju, Korea Selatan (Putra dan Prinanda 2023). Para negara anggota ASEAN dan Korea Selatan tentu berupaya mengoptimalkan pemanfaatan AKFTA demi kepentingan nasional masing-masing negara. Berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian AKFTA, negara-negara ASEAN mendapatkan akses pasar bebas untuk ekspor mereka, seiring dengan kebijakan Korea Selatan pada tahun 2010 yang menetapkan penghapusan tarif secara menyeluruh untuk seluruh pos tarif dalam jalur normal (Putra dan Prinanda 2023).

Sebagai ganti, impor dari Korea Selatan ke lima negara ASEAN yaitu Malaysia, Brunei Darussalam, Thailand, Singapura, dan Filipina hanya memiliki keterbatasan fleksibilitas dalam menerapkan tarif nol terhadap seluruh pos tarif dalam kerangka skema jalur normal. Sementara itu, tarif yang diberlakukan oleh negara-negara ASEAN, kecuali Vietnam, Kamboja, Laos, dan Myanmar, telah dihapus pada tahun 2012. Ketentuan ini memberikan tambahan waktu bagi produk-produk Korea untuk menikmati tarif nol dalam kerangka Jalur Normal (Alunaza dkk. 2023). *ASEAN-Korea Centre* (AKC) merupakan organisasi antar-pemerintah yang dibentuk pada tahun 2009 dengan tujuan untuk memperkuat hubungan ekonomi dan pertukaran budaya antara negara-negara anggota. Sejak pendiriannya, organisasi ini telah menyelenggarakan ratusan program yang sebagian besar mengikutsertakan partisipasi masyarakat dari Korea Selatan dan ASEAN. Perdagangan, pariwisata dan investasi adalah bagian dari program AKC, dan pertukaran budaya dan *people-to-people* adalah bagian dari hubungan yang berkembang pesat antara ASEAN dan Korea Selatan (Dermawan dan Rohmaniah 2019).

Lalu ada *ASEAN Defence Ministers Meeting Plus* (ADMM-Plus). ADMM-Plus merupakan forum kerja sama pertahanan multilateral yang mempertemukan 10 negara anggota ASEAN dengan 8 mitra dialog, yaitu Australia, Tiongkok, India, Jepang, Selandia Baru, Korea Selatan, Rusia, dan Amerika Serikat. Forum ini dibentuk pada 2010 sebagai pengembangan dari pertemuan para menteri pertahanan ASEAN dan berfungsi sebagai mekanisme utama untuk membangun rasa saling percaya serta memperkuat kerja sama keamanan kawasan. Melalui dialog, keterbukaan, dan kerja sama operasional, ADMM-Plus berupaya meningkatkan kapasitas pertahanan ASEAN, khususnya dalam menghadapi ancaman keamanan lintas negara. Sejak 2017, ADMM-Plus diadakan setiap tahun untuk memperkuat dialog dan kerja sama antara ASEAN dan Negara-Negara *Plus* di tengah lingkungan keamanan regional yang semakin menantang (ASEAN Defence Ministers Meeting 2025).

Korea Selatan aktif berpartisipasi dalam *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) (Nicolas 2021). Salah satu aspek penting yang perlu disorot adalah peran RCEP dalam memperkuat kerja sama ekonomi dan perdagangan regional. RCEP adalah perjanjian perdagangan bebas terbesar yang pernah disepakati, mencakup 15 negara termasuk sepuluh anggota ASEAN yaitu Kamboja, Brunei Darussalam, Laos, Indonesia, Myanmar, Malaysia, Singapura, Filipina, Vietnam, dan Thailand, serta lima mitra dagang utama ASEAN yaitu Australia, China, Jepang, Korea Selatan, dan Selandia Baru. Perjanjian ini memberikan manfaat besar bagi negara-negara anggotanya karena mencakup sekitar 30% dari jumlah penduduk dunia, volume perdagangan global, arus investasi asing langsung, serta total Produk Domestik Bruto (PDB) global.

Perjanjian perdagangan multilateral berskala terbesar yang mulai berlaku pada 1 Februari 2022 dan hingga kini tetap berjalan (Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia 2023).

2.2 Kebijakan *New Southern Policy* oleh Moon Jae-in

Pemerintahan Moon Jae-in menyadari bahwa diversifikasi perdagangan dan investasi asing diperlukan untuk mengatasi reorganisasi tatanan ekonomi global yang disebabkan oleh ketegangan Amerika Serikat-China dan untuk mengurangi ketergantungan yang berlebihan pada China. Dalam menghadapi tantangan yang mengancam keamanan negara, Korea Selatan berfokus pada peningkatan hubungan diplomatik yang lebih baik (Yoo dkk. 2020). *New Southern Policy* (NSP) adalah program unggulan Presiden Moon Jae-in yang resmi diluncurkan pada November 2017, dengan tujuan menempatkan hubungan Korea Selatan dengan ASEAN dan India pada tingkat kepentingan yang setara dengan hubungannya bersama Amerika Serikat, Tiongkok, Jepang, dan Rusia (Nicolas 2021). NSP berfungsi sebagai referensi Korea Selatan untuk kebijakan luar negeri regional terhadap ASEAN dan India, yang merupakan kekuatan menengah yang lebih kuat dalam struktur internasional (Peng Er 2023).

Presiden Moon Jae-in menegaskan bahwa NSP tidak semata berfokus pada kerja sama ekonomi, melainkan juga pada upaya membangun komunitas yang damai, sejahtera, dan berorientasi pada rakyat. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, NSP menerapkan *whole-of-government approach* yang melibatkan hampir seluruh kementerian serta menuntut agenda pembangunan di berbagai aspek kebijakan terkait ASEAN dan India (Lee 2023). NSP menempatkan ASEAN dan negara-

negara anggotanya pada posisi yang sangat diutamakan dalam hubungan luar negeri Korea Selatan, sebuah prioritas yang belum pernah diberikan sebelumnya. Kebijakan ini tercermin dari komitmen pribadi yang kuat Presiden Moon Jae-in, diplomasi aktif melalui Konferensi Tingkat Tinggi dengan ASEAN, serta penguatan struktur kelembagaan Korea Selatan untuk mendukung pelaksanaan NSP (Pradityo 2022).

NSP sangat penting untuk keterlibatan Korea Selatan dengan ASEAN karena memberikan konsistensi dan keberlanjutan (Wongi 2021). Fokus Korea Selatan pada ekonomi dan kerja sama bilateral NSP menunjukkan dilema strategis yang dihadapinya dalam geopolitik Indo-Pasifik yang berkembang, terlepas dari upayanya untuk menjadi kekuatan ekonomi Asia yang berkembang pesat. NSP adalah program kerja sama fungsional dan ekonomi dengan bantuan pembangunan sebagai sarana utamanya (Peng Er 2023). NSP memiliki tiga pilar. Pilar pertama ‘Rakyat’, menekankan upaya untuk memperkuat kesejahteraan bersama dengan membangun hubungan yang lebih erat, menciptakan lingkungan yang aman, serta memperluas interaksi. Tujuan utamanya adalah membentuk masyarakat yang menghormati nilai kemanusiaan melalui pengembangan sumber daya manusia berbasis kepentingan bersama (Indraswari 2022). Dalam pilar ini, berbagai upaya seperti perbaikan sistem visa telah dilakukan untuk mendorong pertukaran masyarakat dan budaya antara ASEAN dan Korea Selatan. Proyek-proyek pengembangan sumber daya manusia juga diperluas, termasuk *Global Korea Scholarship*. Upaya-upaya tersebut sangat berkontribusi dalam meningkatkan pertukaran budaya serta mempromosikan saling pengertian antara kedua belah pihak, terutama kaum muda (Lee dan Ro 2021).

Mayoritas warga ASEAN di Korea Selatan adalah pekerja migran, disusul pelajar dan imigran karena pernikahan. Jumlah terbesar berasal dari Vietnam (251.000), Thailand (183.000), dan Filipina (50.000). Sementara itu, ribuan warga Korea Selatan juga bermukim di negara-negara ASEAN, terutama di Vietnam (172.684), Indonesia (22.774), Singapura (21.406), Malaysia (20.861), dan Thailand (20.200). Di bidang pendidikan, mahasiswa ASEAN mendominasi 39% dari total mahasiswa asing di Korea Selatan pada 2020, yakni 64.319 orang, dengan 92% di antaranya dari Vietnam, angka yang meningkat tajam sejak pertengahan 2010-an. Sebagian besar mahasiswa asing mendaftar di program bahasa, lalu sarjana, master, dan pascasarjana. Korea juga memperkenalkan program beasiswa HEAT (*Higher Education ASEAN Talents*) bagi pejabat pemerintah dan akademisi ASEAN. Untuk memperkuat pertukaran budaya, *Korea Foundation* (cabang diplomasi publik di bawah naungan Kementerian Luar Negeri Korea Selatan) bersama *Busan Municipality* mendirikan Rumah Budaya ASEAN sebagai simbol upaya saling memahami. Sebagai balasan, Korea Selatan membuka Pusat Kebudayaan Korea di Bangkok, Jakarta, Manila, dan Hanoi untuk mempromosikan *K-food*, *K-pop*, bahasa Korea, serta berbagai kegiatan budaya lainnya (Indraswari 2022).

Pertukaran sosial-budaya dan antar masyarakat antara Korea Selatan dan ASEAN berkembang pesat. Pada 2018, lebih dari 7,9 juta warga Korea berkunjung ke Asia Tenggara, sekitar 29% dari total wisatawan luar negeri Korea Selatan, yang mana menjadikan kawasan ini sebagai destinasi favorit mereka. Sebaliknya, sekitar 2,4 juta warga Asia Tenggara mengunjungi Korea pada tahun yang sama, menempatkan mereka di posisi ketiga setelah wisatawan asal Tiongkok dan Jepang.

Kehadiran warga Asia Tenggara juga semakin nyata dalam masyarakat Korea, dengan lebih dari 300.000 orang tinggal di sana pada 2017 sebagai pelajar, pekerja migran, maupun imigran karena pernikahan. Sebagai timbal balik, jumlah warga Korea yang tinggal di 10 negara Asia Tenggara juga mencapai angka yang serupa (Jaehyon 2019). Posisi Korea Selatan di kawasan ditunjukkan oleh Survei ASEAN 2020 oleh ISEAS. Karena negara-negara ASEAN menjadi destinasi wisata populer bagi para wisatawan Korea Selatan, ikatan ekonomi Korea Selatan dan ASEAN membantu kerja sama kedua negara tersebut. Sebaliknya, wisatawan dari ASEAN adalah kelompok ketiga terbesar yang mengunjungi Korea Selatan pada tahun 2018 (Indraswari dan Joo 2022).

Pilar kedua ‘Perdamaian’, ASEAN dan Korea Selatan sepakat untuk bekerja sama berdasarkan pemahaman bersama untuk membawa perdamaian di Semenanjung Korea dan juga di kawasan Indo-Pasifik. Salah satu aspek penting adalah bahwa ASEAN menyatakan kesiapannya untuk memainkan peran konstruktif dalam proses perdamaian Semenanjung Korea, sementara Korea Selatan menunjukkan dukungannya terhadap Pandangan ASEAN mengenai Indo-Pasifik dan mencari cara untuk kerja sama maritim (Lee dan Ro 2021). Korea Selatan dan ASEAN menghadapi tantangan keamanan yang berbeda. Bagi Korea Selatan, isu utama adalah ancaman dari Korea Utara, sedangkan bagi sebagian besar negara ASEAN, perhatian lebih tertuju pada sengketa Laut Cina Selatan. Perbedaan ini membuat kedua pihak sulit menemukan ancaman keamanan bersama sebagai dasar utama kerja sama. Meski demikian, peluang kerja sama keamanan tetap ada, salah satunya melalui industri pertahanan. Beberapa negara mitra NSP

tercatat menjadi pasar penting, dengan menyumbang lebih dari separuh total ekspor senjata Korea Selatan pada periode 2015-2019.

NSP juga menekankan kerja sama industri keamanan dan pertahanan. Sebagai contoh, Konferensi Tingkat Tinggi khusus ASEAN-Korea Selatan mendukung upaya dilakukan untuk mengubah Zona Demiliterisasi (DMZ) menjadi kawasan perdamaian di tingkat internasional. Selain itu, Korea Selatan dan Thailand juga menandatangani *General Security of Military Information Agreement* (GSOMIA) pada September 2019 (Min-Hua 2020). Fokus perdamaian antara ASEAN dan Korea Selatan adalah pembangunan perdamaian regional, bukan masalah militer dan keamanan. Perdamaian diperlukan untuk kemakmuran, dan kedua domain ini konvergen untuk kepentingan ASEAN dan warga negara Korea Selatan (Pradityo 2022a).

Pilar ketiga, "Kemakmuran" adalah untuk mewujudkan kerja sama ekonomi yang saling menguntungkan dan berorientasi pada masa depan. Korea Selatan ingin membantu negara mitra NSP mencapai pertumbuhan berkelanjutan dengan meningkatkan perdagangan dan investasi serta berbagi pengetahuan dan pengalaman pembangunan. Selama setahun fiskal pertama NSP, volume perdagangan Korea Selatan dan ASEAN meningkat 7,6%. Pada tahun 2018, volume perdagangan mencapai USD 159,7 miliar, dengan Vietnam mencapai USD 68,2 miliar, Indonesia mencapai USD 20 miliar, Singapura mencapai USD 19,8 miliar, dan Malaysia mencapai USD 19,5 miliar. NSP pada awalnya bertujuan untuk mencapai 200 miliar pada tahun 2020, tetapi total menurun menjadi 144 miliar pada tahun 2020 karena pandemi COVID-19. Negara dengan mitra individu terbanyak masih dipegang oleh negara Vietnam dengan 48%, diikuti oleh

Singapura dengan 13%, Malaysia dengan 12%, Indonesia dengan 10%, dan Thailand dengan 8% (Indraswari 2022).

Pada tahun 2019 eksportnya mencapai USD 95,1 miliar dan impornya USD 56,2 miliar. Akibatnya, pangsa ASEAN dalam ekspor Korea Selatan meningkat, yang pada tahun 2019 mencapai 17,5%, sehingga memperkuat posisi ASEAN sebagai pasar terbesar kedua untuk barang-barang Korea Selatan, setelah China (Oskar Pietrewicz 2021). NSP memiliki fokus yang jelas pada negara-negara ASEAN, yang kini menjadi wilayah dengan proyek infrastruktur terbanyak bagi Korea sekaligus pasar potensial bagi sektor keuangan Korea. Meskipun terdampak krisis COVID-19, perdagangan dan investasi Korea-ASEAN pada 2020 relatif stabil, hanya turun masing-masing 4,9% (USD 143,8 miliar) dan 4,1% (USD 9,2 miliar). Bahkan, pangsa perdagangan dan investasi Korea di ASEAN sedikit meningkat, dari 14,5% dan 15,4% menjadi 14,7% dan 16,7% (Ha dan Ong 2020).

NSP membuka peluang bagi perusahaan Korea Selatan untuk menanamkan modal di kawasan ASEAN, baik melalui pendirian usaha sendiri maupun lewat kemitraan dengan perusahaan lokal. Jumlah perusahaan Korea Selatan di ASEAN menunjukkan tren peningkatan, dari 13.388 pada tahun 2017 menjadi 16.694 pada tahun 2020. Namun, laju pertumbuhan tersebut sempat melambat hingga separuhnya akibat pandemi Covid-19, dengan hanya 1.394 perusahaan baru yang berinvestasi pada tahun 2019. Dari total investasi tersebut, hampir separuhnya terkonsentrasi di Vietnam (7.514 perusahaan), disusul oleh Indonesia (2.332), Filipina (1.771), dan Singapura (1.333) (Indraswari 2022).

Melalui NSP, Korea Selatan telah menjalankan berbagai proyek kerja sama pembangunan infrastruktur di kawasan. Misalnya, Indonesia dan Korea Selatan

menandatangani nota kesepahaman untuk pembangunan sistem kereta api ringan (LRT) di Jakarta, sebagai bagian dari rangkaian perjanjian dengan nilai total mencapai sekitar USD 1,9 miliar. Selain itu, sejumlah perusahaan Korea Selatan juga telah menanamkan investasi besar di Indonesia. POSCO (*Pohang Iron and Steel Company*), misalnya, mendirikan perusahaan patungan bernilai miliaran dolar bersama Krakatau Steel, Hyundai Motors membangun pabrik otomotif, sementara Samsung Electronics merakit ponsel pintar di Indonesia. Vietnam pun menjadi tujuan utama investasi Korea Selatan, dengan pabrik perakitan ponsel Samsung yang termasuk salah satu terbesar di dunia. Merek-merek Korea Selatan seperti Samsung, Hyundai, dan LG telah lama dikenal di ASEAN. Sebagai upaya memperkuat hubungan dengan kawasan tersebut, Korea juga mendirikan *ASEAN-Korea Centre* (AKC) di Seoul pada 2012, yang pada 2019 memiliki anggaran tahunan mencapai USD 100 juta, terbesar di antara semua mitra dagang ASEAN (De 2021).

NSP telah mencapai banyak hal penting sejauh ini. Pertama, NSP telah mengubah dan memperluas jumlah proyek inti sejak 2017. Ini dilakukan berdasarkan pendapat para ahli swasta, lembaga publik, perusahaan publik, dan kebutuhan lokal ASEAN. Pada bulan November 2018, ‘Komite Kepresidenan NSP’ mempresentasikan 16 tugas strategis dan 32 proyek inti untuk pertama kalinya. Pada bulan April 2019, komite mengumumkan 50 proyek, dengan 18 proyek tambahan. Pada bulan September 2019, NSP diperluas menjadi 16 tugas strategis dan 57 proyek inti. Lalu setelah itu, komite memutuskan untuk memperluas NSP menjadi 19 tugas dan 57 proyek inti menjadi 92 proyek (Sungil Kwak 2020). Korea Selatan masih dapat memperbaiki beberapa kebijakan dan

pendekatannya terhadap ASEAN terlepas dari keberhasilan awal NSP (Lee dan Ro 2021).

Peningkatan infrastruktur implementasi kebijakan lebih dari sebelumnya adalah yang paling penting. Ini termasuk meningkatkan ukuran organisasi, anggaran, dan sumber daya manusia untuk mendukung pelaksanaan kebijakan. Hal-hal ini sangat penting untuk implementasi kebijakan secara efektif, konsisten dan sistematis (Lee dan Ro 2021). Salah satu tujuan penting NSP lainnya adalah memanfaatkan kekuatan soft power Korea Selatan untuk mencapai tujuan negara middle power. Korea Selatan memiliki banyak peluang untuk mencapainya dengan negara-negara mitra NSP (Botto 2021). Pada November 2020, Presiden Moon Jae-in meluncurkan versi terbaru dari *New Southern Policy* yang dikenal dengan nama *New Southern Policy Plus* (NSPP).

NSPP memiliki fitur baru yang berfokus pada peningkatan kerja sama dengan para negara Asia Tenggara di berbagai sektor, seperti infrastruktur, ekonomi digital, pandemi dan kesehatan masyarakat, pengembangan sumber daya manusia, dan perubahan iklim (Peng Er 2023). Untuk menjamin perdagangan bebas dan keamanan masyarakat, Korea Selatan dan mitra NSP harus bekerja sama untuk mengatasi krisis kesehatan global dan membangun kembali rantai nilai global (Lee dan Ro 2021). Dalam hal ini, tujuh inisiatif strategis NSPP adalah sebagai berikut: (1) kerja sama yang komprehensif dalam menangani pandemi COVID-19 dalam bidang kesehatan dan medis, (2) berbagi model pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia Korea Selatan, (3) mendorong pertukaran budaya melalui konten Hallyu, (4) membangun investasi dan hubungan perdagangan yang saling menguntungkan, (5) pengembangan perkotaan dan

infrastruktur pertanian, dan (6) kerja sama dalam industri masa depan, (7) kerja sama keamanan *non-konvensional* (Lee 2023).

BAB 3

IMPLEMENTASI LIMA PILAR *MIDDLE POWER ACTIVISM* KOREA SELATAN DALAM KERJA SAMA DENGAN ASEAN ERA PRESIDEN MOON JAE-IN

3.1 Kapasitas yang dimiliki oleh Korea Selatan

Presiden Moon Jae-in memperkuat kapasitas diplomasi ASEAN dengan membentuk *Presidential Committee on New Southern Policy* (PCNSP) pada 2018. Komite ini berfungsi sebagai pusat koordinasi lintas kementerian dan lembaga sehingga NSP menjadi kebijakan nasional yang terintegrasi, bukan hanya agenda satu kementerian. Keberadaan PCNSP mengurangi tumpang tindih kebijakan, mempercepat pengambilan keputusan, dan memperluas cakupan diplomasi melalui keterlibatan aktor non-negara seperti perusahaan, pemerintah daerah, dan lembaga riset. Dengan demikian, kapasitas diplomasi Korea bersifat multi-level dan multi-aktor (Mission of the Republic of Korea to ASEAN, t.t.-b). Struktur kelembagaan ini memperlihatkan ketahanan birokrasi melalui koordinasi kebijakan, pemantauan proyek, dan penyesuaian terhadap perubahan prioritas, misalnya saat pandemi COVID-19 ketika fokus beralih ke diplomasi kesehatan (Botto 2021).

Pada era pemerintahan Moon Jae-in, profesionalisme diplomatik Korea Selatan tercermin dari strategi negara ini dalam menjalin hubungan dengan ASEAN melalui pendekatan yang konsisten, terstruktur, dan terarah. Diplomasi Korea Selatan didukung oleh korps diplomatik yang memiliki pengalaman luas dalam isu-isu multilateral. Para diplomat Korea Selatan aktif berpartisipasi dalam berbagai forum. Keterlibatan mereka tidak hanya bersifat seremonial, melainkan juga

substantif dengan mengajukan inisiatif kerja sama di bidang keamanan non-tradisional, penanggulangan bencana, keamanan maritim, hingga kesehatan global. Hal ini menggambarkan kapasitas negosiasi serta kemampuan membingkai isu khas *middle power*, yakni mendorong terciptanya kompromi yang dapat diterima oleh seluruh pihak (Kamaruddin dan Deivasagayam 2023).

Diplomasi Korea Selatan di era Moon Jae-in juga menunjukkan pendekatan lintas-sektor dan *whole-of-government*. NSP dijalankan melalui koordinasi antar-kementerian, MOFA (*Ministry of Foreign Affairs*) memimpin tetapi kementerian perdagangan, industri, kesehatan, dan lembaga pembangunan seperti KOICA (*Korea International Cooperation Agency*) serta *ASEAN-Korea Centre* turut terlibat. Pendekatan ini memastikan kebijakan luar negeri lebih komprehensif, konsisten, dan tidak terfragmentasi. Pemerintah Korea Selatan memanfaatkan *think-tank* dan lembaga riset untuk menyusun argumen diplomatik, menyesuaikan program dengan kebutuhan mitra, serta menghadirkan solusi teknis yang dapat diimplementasikan, misalnya dalam standar *smart city* atau interoperabilitas data (Yun dan Galas 2023). Pendekatan berbasis bukti meningkatkan kredibilitas Korea Selatan di mata mitra ASEAN.

Profesionalisme diplomatik Korea Selatan pada masa pemerintahan Moon Jae-in juga tampak dari peran aktif misi diplomatiknya di kawasan ASEAN. Melalui *Mission of the Republic of Korea to ASEAN* yang berlokasi di Jakarta. Misi kedutaan, *Mission of the Republic of Korea to ASEAN* bertindak sebagai *operational hub* yang menerjemahkan arahan strategi nasional (NSP) menjadi langkah teknis yaitu menindaklanjuti MoU (*Memorandum of Understanding*), memfasilitasi pertemuan teknis antar-kementerian, mengoordinasikan proyek yang

dibiayai lewat AKCF/KOICA (*Korea International Cooperation Agency*), dan menyinkronkan pelaksanaan dengan Sekretariat ASEAN serta otoritas nasional di negara mitra. Peran ini bersifat rutin (*follow-up, admin, technical facilitation*) sekaligus strategis (*agenda-setting*) (“Republic of Korea Opens Its Mission to ASEAN” 2012). Hal ini memudahkan koordinasi teknis dalam penerapan kebijakan NSP, khususnya di bidang konektivitas digital, pembangunan berkelanjutan, dan kesehatan masyarakat. Korea Selatan menginisiasi dan mempromosikan inisiatif terkait kesehatan dan digitalisasi pada pertemuan ASEAN-ROK dan forum terkait, menggunakan momentum pertemuan puncak (*ASEAN-Republic of Korea Commemorative Summit Busan*) untuk mendapatkan perhatian dan komitmen multilateral (Kamaruddin dan Deivasagayam 2023).

Profesionalisme juga tercermin dari misi diplomatik dan liaison yang efektif. *Mission to ASEAN* serta kantor-kantor kedutaan di negara anggota bertindak sebagai pusat koordinasi teknis, menindaklanjuti kesepakatan, mengatur proyek NSP, serta memfasilitasi pertemuan antar-kementerian. Kolaborasi dengan Sekretariat ASEAN dan pihak lokal memastikan program seperti *smart city pilots* atau kerja sama kesehatan dapat berjalan lancar. Dengan jaringan misi yang kuat, ide dari pusat pemerintah dapat diuji dan dijalankan secara cepat, meningkatkan kelincahan implementasi. Kapasitas finansial terlihat dari penguatan *ASEAN-Korea Cooperation Fund* (AKCF). Pada 2019, kontribusi Korea Selatan digandakan menjadi sekitar USD 14 juta per tahun, memungkinkan lebih banyak proyek di bidang pendidikan, kesehatan, teknologi digital, dan UKM. Hingga 2022, AKCF telah membiayai lebih dari 450 proyek sejak berdiri, dengan kontribusi kumulatif lebih dari USD 230 juta (Sungil Kwak 2020). Dalam bidang ekonomi, Korea

Selatan mengembangkan jejaring bisnis dan *start-up* melalui *ASEAN-ROK Start-up Summit* serta platform B2B, yang menghubungkan perusahaan Korea Selatan dengan pasar ASEAN. Strategi ini tidak hanya memperkuat investasi dan rantai nilai, tetapi juga memastikan bahwa hubungan diplomatik diwujudkan dalam kerja sama ekonomi nyata (ASEAN-KOREA CENTRE, t.t.).

ASEAN menjadi mitra dagang kedua terbesar bagi Korea Selatan, dengan nilai perdagangan mencapai USD 156,5 miliar pada 2019 sebelum pandemi. Investasi Korea Selatan di ASEAN juga meningkat pesat, khususnya di Vietnam yang menjadi hub manufaktur utama bagi perusahaan elektronik dan otomotif Korea Selatan. Selain perdagangan, Korea Selatan menunjukkan kapasitas regulatif dengan menandatangani dan meratifikasi RCEP (*Regional Comprehensive Economic Partnership*), yang berlaku sejak 1 Februari 2022. Kehadiran Korea Selatan dalam RCEP memperkuat kapasitas hukum dan aturan yang menguntungkan ASEAN dan memperkuat integrasi ekonomi kawasan (Kamaruddin dan Galas 2019).

Jejaring sektoral menjadi saluran utama bagi Korea Selatan untuk menghadirkan solusi praktis. Di bidang *smart city*, Korea memanfaatkan *K-City Network* dan *ASEAN Smart Cities Network* (ASCN), serta pertemuan menteri terkait, untuk menghubungkan perusahaan, universitas, dan pemerintah kota ASEAN. Korea Selatan memanfaatkan kapasitas teknologinya melalui proyek-proyek seperti *ASEAN Smart Cities Network* (ASCN). Korea Selatan menggelar *Korea-ASEAN Smart City Fair* di Busan (2019), menghadirkan perusahaan teknologi, pemerintah daerah, dan kota-kota ASEAN untuk merancang kerja sama infrastruktur digital dan kota pintar. Lembaga seperti KIND (*Korea Overseas*

Infrastructure & Urban Development Corporation) didirikan untuk mendukung proyek pembangunan di ASEAN (Martinus 2020).

Di ranah sosial dan budaya, Korea Selatan memperkuat jaringan masyarakat sipil dan *soft power* melalui *ASEAN-Korea Centre*, *ASEAN Culture House*, festival budaya dan musik, program beasiswa, serta pelatihan teknis. Kegiatan-kegiatan ini meningkatkan kepercayaan, mempermudah pelaksanaan proyek di tingkat lokal, dan memberikan *leverage soft power* untuk mendukung upaya diplomasi formal (Gunawan 2024). Korea Selatan menggunakan Hallyu, program beasiswa, pertukaran budaya, dan pelatihan teknis untuk membangun goodwill dan memperkuat jaringan sipil di negara mitra. Strategi ini membantu menciptakan basis sosial yang mendukung keberlanjutan inisiatif diplomatik (Fayza dkk. 2022). gelombang budaya Korea atau Hallyu juga sangat diminati di kawasan ASEAN. ASEAN menjadi pasar Hallyu terbesar kedua setelah Asia Timur, dengan potensi lima kali lebih besar dibandingkan Amerika Utara dan sepuluh kali lebih besar dari Eropa (The Jakarta Post 2019).

Lembaga *think-tank* seperti KIEP (*Korea Institute for International Economic Policy*), KF (*Korea Foundation*), serta universitas-universitas menyediakan studi, analisis kelayakan, dan pemantauan proyek, sehingga program dapat dijalankan secara berbasis bukti dan sesuai dengan kebutuhan mitra ASEAN (Rabena 2021). Selain itu, pada masa pandemi COVID-19, kapasitas finansial Korea Selatan terlihat jelas. Korea Selatan menyalurkan bantuan medis, alat kesehatan, serta kontribusi khusus ke *ASEAN COVID-19 Response Fund*. Jumlah bantuan mencapai puluhan juta dolar, termasuk USD 6 juta yang didedikasikan untuk mendukung sistem kesehatan ASEAN. Dengan demikian, kapasitas Korea

bukan hanya dalam retorika, tetapi juga dalam kemampuan menyalurkan dana sesuai kebutuhan mitra (Kim dkk. 2023).

Korea Selatan memberikan dukungan teknis melalui pengiriman peralatan medis, obat-obatan, dan teknologi kesehatan. Bantuan ini tidak sekadar berupa donasi, tetapi juga mencakup transfer teknologi, seperti penyediaan *rapid test kits*, serta penerapan protokol kesehatan berbasis data. Korea Selatan turut aktif dalam berbagai forum kesehatan multilateral, termasuk *ASEAN+3 Health Ministers' Meeting*, *East Asia Summit Health Cooperation*, serta *mekanisme joint task force* terkait pandemi. Keterlibatan ini memungkinkan pertukaran informasi, pembelajaran praktik terbaik, serta koordinasi strategi regional dalam menghadapi COVID-19. Inisiatif teknis ini menunjukkan kemampuan Korea Selatan dalam memanfaatkan kapasitas non-fisik, meliputi profesionalisme diplomatik, analisis berbasis bukti, dan koordinasi birokrasi untuk menghadirkan solusi praktis bagi mitra-mitranya di ASEAN (Kim dkk. 2023).

Dalam isu keamanan, Korea Selatan menunjukkan kapasitas dengan menjadi *co-chair* gugus kerja ADMM-Plus untuk keamanan maritim 2017-2020 dan keamanan siber 2021-2024. Dengan berperan dalam forum ini, Korea berkontribusi pada keamanan non-tradisional tanpa menimbulkan kecurigaan politik dari ASEAN. Di ADMM-Plus, setiap bidang keamanan non-tradisional dikelola oleh sebuah *Experts' Working Group* (EWG) yang dipimpin bersama (*co-chaired*) oleh satu negara anggota ASEAN dan satu mitra dialog. Korea Selatan mendapat kepercayaan untuk menjadi *co-chair EWG Maritime Security 2017–2020* bersama Singapura. Kegiatan latihan mencakup operasi pemeriksaan kapal (*board-and-search*), pendaratan helikopter lintas kapal, komunikasi pertahanan, serta

penerapan *Code for Unplanned Encounters at Sea* (CUES), yang berperan penting dalam meningkatkan interoperabilitas dan mengurangi risiko insiden di laut (Ministry of Defence, t.t.) Kemampuan institusional, koordinasi antar-kementerian, pengelolaan proyek, dan fleksibilitas operasional menjadi landasan bagi Korea Selatan untuk berperan aktif dalam kerja sama dengan ASEAN. Walaupun terbatas secara sumber daya non-material dan dipengaruhi oleh dinamika geopolitik, birokrasi yang tangguh ini memungkinkan Korea Selatan berfungsi sebagai broker normatif sekaligus mitra strategis yang terpercaya di kawasan (Botto 2021).

3.2 Pendekatan Presiden Moon Jae-in terhadap ASEAN

Pada kebijakan *New Southern Policy* (NSP) yang digagas oleh Presiden Moon Jae-in, ASEAN menempati posisi strategis sebagai mitra utama dalam upaya diversifikasi hubungan luar negeri Korea Selatan. NSP dirancang dengan tiga pilar utama *People, Prosperity, Peace*. Kerangka ini merupakan inovasi kreatif karena selaras dengan Komunitas ASEAN (sosial-budaya, ekonomi, politik-keamanan). Dengan menggunakan bahasa yang akrab bagi ASEAN, Korea Selatan menunjukkan *intellectual leadership* yaitu menyajikan konsep kerja sama yang resonan dengan identitas dan prioritas mitra. Korea Selatan juga berambisi untuk memperkuat peran diplomatiknya sebagai kekuatan menengah serta menyesuaikan tingkat hubungan dengan Asia Tenggara agar sejalan dengan meningkatnya nilai strategis dan ekonomi kawasan-kawasan tersebut bagi kepentingan nasional Korea Selatan (Botto 2021).

NSP memainkan peran penting dalam kebijakan luar negeri Korea Selatan, dan NSP tampaknya merupakan mitra dialog ASEAN yang paling dekat untuk

menyelaraskan kepentingan dalam negerinya dengan tujuan pembangunan komunitas ASEAN (Thuzar 2021). Menjelang akhir 2020, sebagai tanggapan atas dampak serius pandemi COVID-19 di Asia Tenggara, pemerintahan Presiden Moon Jae-in meluncurkan *New Southern Policy Plus* (NSP *Plus*) sebagai pengembangan dari kerangka NSP. Kebijakan ini menghadirkan tujuh inisiatif prioritas yang difokuskan untuk menghadapi tantangan pasca-pandemi dan mendorong pemulihan komprehensif di negara-negara mitra ASEAN. Langkah tersebut mencerminkan kreativitas struktural Korea Selatan sebagai *middle power* yang menyadari berakhirnya tatanan lama dan perlunya ide-ide baru yang lebih adaptif serta inklusif (Lee dan Ro 2021).

Salah satu bentuk inovasi kreatif dalam NSP *Plus* adalah penekanan yang lebih kuat pada kerja sama di bidang kesehatan publik. Dalam berbagai pernyataannya, Presiden Moon Jae-in menegaskan bahwa NSP *Plus* dirancang selaras dengan *ASEAN Comprehensive Recovery Framework*, sehingga mendukung pemulihan bersama tidak hanya di sektor ekonomi, tetapi juga pada aspek kesehatan. Implementasinya mencakup pemberian bantuan peralatan medis, peningkatan kapasitas sistem kesehatan, serta penggandaan alokasi dana ODA khusus untuk sektor kesehatan (Mateo 2020).

Di sisi lain, sektor pendidikan memperoleh perhatian penting dalam kerangka *people pillar*. Melalui NSP *Plus*, Korea Selatan mendorong penerapan model pendidikan bergaya Korea Selatan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengembangan *e-learning*, program pelatihan vokasional, serta pemberian beasiswa khusus bagi generasi muda ASEAN. Upaya ini mencerminkan kreativitas dalam membangun modal manusia sebagai fondasi pemulihan jangka

panjang. Tujuh inisiatif dalam *NSP Plus* juga menekankan pentingnya pertukaran budaya berbasis digital, yang menjadi terobosan diplomasi di era transformasi digital. Melalui wadah seperti *ASEAN-Korea Film Organization* dan *ASEAN-Korea Cultural Heritage Cooperation Organization*, Korea Selatan mendorong interaksi budaya dua arah secara lebih terstruktur dan relevan dengan situasi pandemi. Langkah ini menunjukkan kreativitas dalam memperluas kedekatan publik dengan menggabungkan kekuatan Hallyu dan teknologi digital secara bersamaan (The Jakarta Post 2020).

NSP Plus disusun agar sejalan dengan prioritas ASEAN pasca-pandemi, khususnya melalui *ASEAN Comprehensive Recovery Framework*. Adanya irisan antara tujuh inisiatif *NSP Plus* dan lima strategi utama pemulihan ASEAN menunjukkan bahwa Korea tidak sekadar menawarkan program unilateral, melainkan turut berkontribusi membangun visi bersama. Pendekatan ini mencerminkan kreativitas strategis, yakni merancang kebijakan Korea Selatan agar selaras dengan agenda regional, sehingga potensi resistensi dapat dihindari dan keberlanjutan kerja sama lebih terjamin (Mateo 2020).

Tiga inisiatif lain dalam *NSP Plus* merefleksikan kreativitas Korea Selatan di ranah *prosperity*. Pertama, memperkuat perdagangan dan investasi berkelanjutan melalui dukungan terhadap UMKM ASEAN, pembangunan landasan manfaat bersama jangka panjang, serta diversifikasi rantai pasok. Kedua, pengembangan infrastruktur perkotaan dan pedesaan dengan memadukan keahlian Korea dan *Master Plan on ASEAN Connectivity 2025*, termasuk dalam kerangka *Smart City*. Ketiga, mendorong pertumbuhan industri masa depan seperti kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*), *startup*, dan teknologi revolusi industri keempat guna

mempercepat transformasi digital serta inovasi ekonomi kawasan (The Jakarta Post 2020).

Konferensi Tingkat Tinggi Busan 2019, yang awalnya dirancang untuk memperingati 30 tahun hubungan ASEAN-Korea Selatan, dimanfaatkan Presiden Moon Jae-in sebagai arena kebijakan yang inovatif, bukan sekadar acara seremonial. Forum ini melahirkan berbagai komitmen konkret, mulai dari kerja sama ekonomi digital, pengembangan *smart cities*, konektivitas, hingga kolaborasi di bidang *startup* dan pelestarian warisan budaya digital (Martinus 2020). Dalam *Co-Chairs' Statement*, para pemimpin menyepakati penguatan *ASEAN-Korea Ministerial Meeting on Smart City* yang terhubung dengan *ASEAN Smart Cities Network* (ASCN), serta kerja sama teknologi digital seperti 5G, AI, dan Big Data sebagai fondasi transformasi industri kawasan. Korea Selatan juga menggagas *ASEAN-Korea Startup Policy Roadmap* serta pendirian *ASEAN-Korea Industrial Innovation Center*, yang menegaskan peran kepemimpinan kreatif Korea Selatan dalam menciptakan wadah baru bagi inovasi (“Special Update on the 2019 ASEAN-Republic of Korea (ROK) Commemorative Summit” 2020).

Kreativitas Presiden Moon Jae-in juga tampak dalam Konferensi Tingkat Tinggi Mekong-Korea Selatan pertama di Busan tahun 2019 yang menghasilkan *Mekong-Han River Declaration*. Pada forum ini, Korea Selatan meningkatkan level kerja sama Mekong dari pertemuan tingkat menteri menjadi tingkat kepala negara atau pemerintahan, menandai perhatian khusus Korea Selatan terhadap pembangunan kawasan Mekong. Deklarasi tersebut menitikberatkan kolaborasi di bidang infrastruktur, pengelolaan sumber daya air, konektivitas, pengembangan SDM, dan lingkungan hidup, dengan dukungan pendanaan melalui perluasan

Mekong-Korea Cooperation Fund (MKCF) (Lee 2019). Langkah ini mencerminkan bentuk *entrepreneurial leadership*, di mana Korea berperan sebagai *broker* yang menghubungkan kebutuhan pembangunan negara-negara Mekong dengan dukungan internasional, sekaligus mengintegrasikan agenda tersebut dengan NSP (Ravenhill 1998).

Dalam ranah *soft power*, di luar aspek ekonomi dan infrastruktur, Presiden Moon Jae-in juga menegaskan pentingnya kreativitas melalui *people-to-people diplomacy*. Korea Selatan memanfaatkan hallyu (*Korean Wave*), pendidikan, dan budaya populer sebagai instrumen diplomasi publik. Salah satu contohnya adalah program *KONNECT ASEAN*, yang didanai oleh *ASEAN-Korea Cooperation Fund* (AKCF). Program ini berhasil mempertemukan ratusan seniman, menyelenggarakan pameran bersama antara ASEAN dan Korea Selatan, serta menjangkau ratusan ribu audiens baik secara langsung maupun daring (Gunawan 2024b). Saat ini, Korea Selatan menjadi salah satu negara yang paling sukses dalam pelaksanaan diplomasi publiknya. Terlebih di bawah kepemimpinan Presiden Moon Jae-in, Diplomasi publik menjadi salah satu agenda utama yang dijalankan melalui pemanfaatan Hallyu. Pada tahun 2018, Presiden Moon Jae-in mengambil langkah kebijakan untuk memperluas penyebaran Hallyu ke tingkat global (Fayza dkk. 2022). Selain itu, pendirian *ASEAN Culture House* (ACH) di Busan berfungsi sebagai simbol institusionalisasi kerja sama budaya jangka panjang. Hal ini mencerminkan modal intelektual yang terinstitusionalisasi, gagasan bahwa hubungan ASEAN-Korea Selatan dapat digerakkan melalui jalur budaya, bukan semata perdagangan dan keamanan, dan kemudian diwujudkan dalam bentuk institusi yang berkelanjutan.

Langkah Korea Selatan membingkai NSP sebagai mitra alami ASEAN *Outlook on the Indo-Pacific* (AOIP) merupakan contoh konkret dari kepemimpinan *middle power*. Jika Amerika Serikat dan Jepang cenderung menekankan konsep *Free and Open Indo-Pacific* (FOIP) dengan nuansa strategis dan implikasi geopolitik yang jelas terhadap Tiongkok, Korea Selatan justru memilih jalur berbeda ialah menekankan isu-isu ekonomi, kesehatan, pembangunan berkelanjutan, dan keamanan non-tradisional. Strategi ini adalah bentuk *entrepreneurial framing*, di mana Korea Selatan secara kreatif merumuskan narasi alternatif yang lebih dapat diterima ASEAN, sehingga mengurangi risiko ditafsirkan sebagai bagian dari blok konfrontatif. Dengan demikian, Korea Selatan tidak hanya menghindari keterjebakan rivalitas kekuatan besar, tetapi juga menawarkan *intellectual capital* berupa konsep kemitraan yang inklusif dan selaras dengan preferensi ASEAN sendiri (Choi 2020).

3.3 Kredibilitas dalam kerja sama Korea Selatan dengan ASEAN

Pada masa pemerintahan Moon Jae-in, Korea Selatan tetap dipandang sebagai negara dengan kualitas demokrasi yang kuat oleh lembaga pemantau independen. Hal ini menunjukkan bahwa Korea Selatan benar-benar konsisten dengan komitmennya terhadap tatanan berbasis aturan (*rule-based order*). *Freedom House* menilai Korea Selatan sebagai negara “Free” dan menekankan independensi lembaga yudisialnya, sebuah indikator penting dari *rule of law* yang relevan bagi kerja sama dengan ASEAN, terutama dalam isu-isu sensitif seperti keamanan siber, kejahatan lintas negara, dan perlindungan data. Kredibilitas demokratis ini bukan satu-satunya sumber legitimasi Korea, namun membantu

memperlancar diplomasi karena mitra lebih percaya pada adanya kepastian prosedural (seperti konsultasi publik dan akuntabilitas), sehingga mengurangi risiko kebijakan yang tiba-tiba atau tidak konsisten (Freedom House 2021).

Di tingkat regional, Korea Selatan secara tegas menyatakan dukungannya terhadap *ASEAN centrality* dan *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific* (AOIP) dalam Konferensi Tingkat Tinggi Peringatan ASEAN-ROK 2019 di Busan. Dalam *Co-Chairs Statement*, disepakati bahwa AOIP dijadikan sebagai panduan kerja sama. Hal ini menjadi sinyal penting bahwa Korea Selatan tidak berusaha menawarkan kerangka Indo-Pasifik tandingan yang bisa bersaing, melainkan menyesuaikan diri dengan hal yang berpusat pada ASEAN. Sikap konsisten ini memperkuat citra Korea Selatan sebagai mitra yang menghargai norma ASEAN, seperti inklusivitas, non-blok, dan pengambilan keputusan berbasis konsensus, sehingga meningkatkan rasa percaya ASEAN terhadap setiap inisiatif lanjutan, baik di bidang konektivitas, kesehatan, maupun digital (Ha 2019).

Korea Selatan menjadi salah satu penandatangan RCEP pada 15 November 2020, pakta perdagangan terbesar di dunia yang mencakup aturan asal barang (ROO), fasilitasi perdagangan, *e-commerce*, hak kekayaan intelektual, serta dukungan bagi UMKM. Langkah ini sejalan dengan preferensi ASEAN terhadap integrasi ekonomi yang berbasis institusi. Partisipasi aktif Korea Selatan mengirimkan pesan bahwa keterlibatan ekonominya di Asia Tenggara berada dalam kerangka aturan yang sama dengan yang dijunjung ASEAN. Hal ini memperkuat citra Korea Selatan sebagai mitra yang dapat diandalkan dalam hal akses pasar, standar teknis, dan kepastian kebijakan perdagangan. Dari sudut pandang kredibilitas, keterlibatan dalam RCEP juga mengurangi potensi perilaku

oportunistik, karena aktivitas perdagangan telah diikat oleh perjanjian multilateral (CONGRESS.GOV, t.t.).

Korea Selatan memperkuat reputasi dengan menyalurkan kontribusi nyata. Korea Selatan meningkatkan kontribusinya ke *ASEAN-Korea Cooperation Fund (AKCF)* secara bertahap, dari USD 7 juta menjadi USD 14 juta pada 2019, naik lagi menjadi USD 16 juta pada 2022, dan direncanakan mencapai USD 32 juta per tahun pada 2027. Kenaikan yang berjenjang ini penting karena menunjukkan komitmen keuangan yang konsisten dalam jangka panjang, bukan sekadar bantuan sekali jadi. Bagi ASEAN, pola pendanaan yang terprediksi (multi-tahun dan berbasis program) mencerminkan kredibilitas Korea Selatan, sehingga proyek-proyek seperti konektivitas digital, kerja sama budaya, dan ketahanan dapat berjalan lebih pasti. Di level global, posisi Korea Selatan sebagai anggota OECD-DAC (*Organisation for Economic Co-operation and Development-Development Assistance Committee*) yang berkomitmen meningkatkan porsi ODA juga memperkuat reputasinya sebagai donor yang patuh pada standar internasional (Yun dan Galas 2023).

Selama masa pandemi, Korea Selatan ikut berkontribusi pada mekanisme COVAX AMC (*COVAX Advance Market Commitment*) dan meningkatkan komitmennya hingga mencapai USD 200 juta untuk periode 2021-2022, sebagai bagian dari diplomasi kesehatan yang menjadi fokus *NSP Plus*. Bagi ASEAN yang sempat mengalami kekurangan pasokan vaksin pada 2021, langkah Korea Selatan ini memperlihatkan konsistensi dan keselarasan nilai, yakni mendukung prinsip akses yang setara terhadap vaksin sebagai barang publik global. Selain itu, dukungan ini juga menunjukkan bahwa Korea Selatan mengandalkan mekanisme

multilateral yang terstruktur, bukan sekadar kesepakatan bilateral sementara (GAVI the Vaccine Alliance 2021).

Pada Oktober 2020, Presiden Moon Jae-in mengumumkan target *net-zero 2050* yang mendapat sambutan positif dari PBB, lalu pada April 2021 di *Leaders Summit on Climate*, Korea Selatan juga menghentikan pendanaan publik untuk PLTU batubara di luar negeri. Bagi ASEAN yang sedang menghadapi transisi energi, langkah ini meningkatkan kredibilitas Korea Selatan sebagai mitra karena kebijakan domestik seperti *K-Green New Deal* selaras dengan komitmen internasional seperti *Paris Agreement*. Kredibilitas Korea dalam hal ini bukan sekadar klaim moral, melainkan ditunjukkan lewat kebijakan nyata yang bisa diverifikasi (United Nations Secretary-General 2020).

Korea Selatan tidak hanya bergerak di tingkat ASEAN secara keseluruhan, tetapi juga merinci kebijakannya melalui kerja sama Mekong-Korea Selatan, misalnya lewat Deklarasi *Mekong-Han River 2019*. Hal ini penting karena menunjukkan bahwa Korea Selatan memahami beragam kebutuhan ASEAN termasuk kesenjangan infrastruktur dan kapasitas di kawasan Mekong serta bersedia menyesuaikan dukungan pembiayaan (hibah, pinjaman ODA, maupun *Mekong-Korea Cooperation Fund*) sesuai prioritas lokal. Penyesuaian kebijakan ini menciptakan kesesuaian (*policy fit*) yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan mitra (“Co-Chairs’ Statement of The 2019 ASEAN-Republic of Korea Commemorative Summit” 2019).

Soft power yang dilembagakan juga menambah kredibilitas karena menyediakan wadah permanen untuk interaksi masyarakat lintas negara, bukan sekadar ajang seremonial atau foto bersama (Korea Foundation, t.t.). ASEAN

Culture House (ACH) di Busan, yang dijalankan oleh *Korea Foundation* sejak 2017, memang dirancang khusus sebagai ruang tetap untuk pameran, kegiatan pendidikan, pertunjukan seni, film, kuliner, dan jejaring kreatif yang terkait dengan ASEAN. Fokusnya pada *everyday diplomacy* menunjukkan bahwa komitmen Korea pada *people-to-people exchange* bukan hanya retorika singkat lewat *Korean Wave*, melainkan sebuah infrastruktur sosial yang terus hidup dari tahun ke tahun. Bagi ASEAN, keberlangsungan institusi budaya ini menandakan ketekunan dan konsistensi niat Korea Selatan (*staying power*) (“한국국제교류재단 KF,” t.t.)

Selama kepemimpinan Moon Jae-in, program seperti *ASEAN-Korea Startup Week*, *ASEAN-Korea Bio & Health Initiative*, dan *Korea-Mekong Cooperation Framework* semakin menguatkan kemitraan ini dan mendapat pengakuan positif dari negara-negara anggota ASEAN. Setelah berakhirnya masa jabatan Presiden Moon Jae-in, inisiatif tersebut tidak hanya terus dijalankan, tetapi juga dikembangkan lebih lanjut oleh pemerintahan berikutnya (*ASEAN-KOREA CENTRE*, t.t.). Presiden Moon Jae-in menunjukkan kredibilitas politik dengan melakukan kunjungan kenegaraan ke seluruh negara anggota ASEAN selama dua tahun masa kepemimpinannya, sebagai bentuk penegasan atas komitmen Korea Selatan dalam mempererat hubungan dengan kawasan tersebut. Hal ini jarang dilakukan pemimpin non-ASEAN dan menunjukkan keseriusan menjadikan ASEAN sebagai prioritas. Segera setelah Presiden Moon Jae-in menjabat, untuk pertama kalinya, ia mengirim utusan khusus yang diwakili oleh walikota Seoul, Park Won-sun, ke Indonesia, Filipina, dan Vietnam, untuk menunjukkan komitmen Korea Selatan terhadap ASEAN (Wongi 2021).

Selain itu, Presiden Moon Jae-in tercatat sebagai Pemimpin Korea Selatan pertama yang melakukan kunjungan ke Brunei Darussalam dalam kurun waktu 19 tahun. Ia juga menjadi pemimpin Korea Selatan pertama yang bersedia mengunjungi Singapura sejak kunjungan terakhir yang dilakukan pada tahun 2003. Presiden Moon Jae-in juga menjadi Presiden Korea Selatan yang kembali mengunjungi Kamboja setelah absen selama 10 tahun (Ha dan Ong 2020). Presiden Moon Jae-in merupakan pemimpin Korea Selatan pertama yang berhasil mengunjungi seluruh negara ASEAN selama masa kepemimpinannya (Kamaruddin dan Deivasagayam 2023).

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Korea Selatan di bawah kepemimpinan Presiden Moon Jae-in (2017–2022) mengimplementasikan kebijakan *New Southern Policy* (NSP) dalam konteks hubungan dengan ASEAN, serta bagaimana kerja sama institusional yang dibangun dapat dipahami melalui perspektif teori *middle power activism*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa NSP bukan hanya instrumen kebijakan luar negeri yang berorientasi pada diversifikasi mitra strategis di luar hubungan tradisional dengan Amerika Serikat, Tiongkok, Jepang, dan Rusia, tetapi juga mencerminkan upaya Korea Selatan untuk menegaskan posisinya sebagai *middle power* yang mampu memainkan peran diplomasi kreatif, kooperatif, dan multilateral di kawasan Asia Tenggara.

NSP menekankan tiga pilar utama, yaitu *People*, *Prosperity*, dan *Peace*. Pilar *People* diarahkan pada penguatan jejaring sosial-budaya, termasuk program pertukaran mahasiswa, kerja sama pendidikan, beasiswa, kegiatan budaya, serta diplomasi publik yang memperluas *soft power* Korea Selatan di kawasan ASEAN. Pilar *Prosperity* menitikberatkan pada kerja sama ekonomi, investasi, serta integrasi rantai pasok dan industri kreatif melalui platform seperti ASEAN–Korea Startup Summit dan jejaring B2B. Sementara itu, pilar *Peace* menekankan pentingnya kerja sama politik-keamanan, baik melalui dialog multilateral seperti *ASEAN Regional Forum* (ARF), *East Asia Summit* (EAS), maupun melalui kerja sama maritim, penanggulangan bencana, dan isu-isu keamanan non-tradisional

lainnya.

Dalam perspektif teori *middle power activism*, kerja sama institusional yang dibangun Korea Selatan melalui NSP dapat dipahami sebagai perwujudan dari tiga karakter utama middle power yaitu *capacity*, *creativity*, dan *credibility*. Dari segi *capacity*, Korea Selatan menunjukkan kemampuannya membangun kerangka kelembagaan yang kuat melalui pembentukan *Presidential Committee on the New Southern Policy*. Komite ini berfungsi sebagai pusat koordinasi lintas kementerian, memantau implementasi kebijakan, serta memastikan keterpaduan antara prioritas nasional Korea Selatan dengan agenda regional ASEAN. Kapasitas kelembagaan ini memperlihatkan bahwa Korea tidak sekadar meluncurkan kebijakan simbolik, tetapi juga menciptakan arsitektur birokratis yang mampu menjaga kesinambungan, bahkan dalam situasi krisis seperti pandemi COVID-19.

Aspek *creativity* tercermin dari upaya Korea Selatan untuk menawarkan inisiatif-inisiatif baru yang bersifat inovatif dan adaptif. Misalnya, dengan menghubungkan *start-up* Korea Selatan dengan pasar ASEAN, Korea berhasil membingkai kerja sama ekonomi tidak hanya pada sektor konvensional seperti perdagangan barang dan jasa, tetapi juga pada sektor ekonomi digital, inovasi teknologi, dan energi berkelanjutan. Kreativitas juga tampak dalam bidang diplomasi budaya, di mana Korea menggunakan daya tarik *K-Culture* sebagai jembatan *people-to-people connectivity* dengan negara-negara ASEAN. Hal ini sejalan dengan konsep kepemimpinan intelektual (*intellectual leadership*) dalam teori *middle power*, yaitu kemampuan untuk menciptakan ide, kerangka kerja, atau agenda baru yang kemudian diterima oleh komunitas internasional.

Dari aspek *credibility*, kerja sama Korea Selatan dengan ASEAN di bawah

NSP memperlihatkan konsistensi kebijakan luar negeri yang berorientasi pada multilateralisme, keterlibatan aktif, dan prinsip saling menguntungkan. Kredibilitas ini semakin diperkuat dengan keanggotaan Korea Selatan dalam forum-forum multilateral seperti ARF, EAS, dan APT (*ASEAN Plus Three*) memberikan legitimasi tambahan terhadap perannya sebagai mitra yang dapat dipercaya. Kredibilitas juga tercermin dalam kontribusi konkret Korea Selatan dalam isu-isu kemanusiaan dan keamanan non-tradisional, misalnya melalui bantuan medis dan vaksin selama pandemi COVID-19, serta kerja sama dalam penanggulangan perubahan iklim dan bencana alam. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa kerja sama institusional antara Korea Selatan dan ASEAN melalui NSP mencerminkan karakteristik khas diplomasi *middle power*.

4.2 Rekomendasi

Dari hasil penelitian yang dilakukan, penulis memandang bahwa kebijakan luar negeri Korea Selatan dan aktivitas diplomatiknya dengan ASEAN akan terus berkembang, sehingga masih terdapat ruang untuk penelitian lanjutan yang dapat dilakukan, seperti penelitian mengenai perbandingan kebijakan Korea Selatan pasca Presiden Moon Jae-in. Penelitian ini dapat membandingkan kontinuitas dan perubahan antara NSP dengan kebijakan luar negeri pemerintahan selanjutnya. Hal ini menarik karena dapat menunjukkan arah jangka panjang diplomasi Korea Selatan di kawasan Asia Tenggara dan Indo-Pasifik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriana, Tasha Regina. 2020. "Diplomasi Publik Korea Selatan sebagai Kekuatan Menengah di Bawah Kepresidenan Moon Jae In." *Jurnal Sentris* 2 (2): 72–78. <https://doi.org/10.26593/sentris.v2i2.4165.72-78>.
- Alda Syahmaya Hasty. 2023. "KEPENTINGAN KOREA SELATAN DALAM PEMBENTUKAN NSP (NEW SOUTHERN POLICY) DI KAWASAN ASIA TENGGARA PADA MASA PEMERINTAHAN PRESIDEN MOON JAE IN." Skripsi, Universitas Sriwijaya. http://repository.unsri.ac.id/126096/14/RAMA_84201_07041281621084_0002037805_0008109301_01_front_ref.pdf.
- Alunaza, Hardi, Kesya Anindya Suhada Putri, dan Githa Nethania Manurung. 2023. "Analisis Dampak ASEAN-Korea Free Trade Area Terhadap Perkembangan Ekspor Impor Indonesia-Korea Selatan 2018-2021." *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial* 4 (3): 128. <https://doi.org/10.36722/jaiss.v4i3.2038>.
- ASEAN Defence Ministers Meeting. 2025. "About the ASEAN Defence Ministers' Meeting Plus." <https://admm.asean.org/index.php/about-admm/about-admm-plus.html>.
- ASEAN-KOREA CENTRE. t.t. "매인페이지 > 홈" Diakses 4 Juli 2025. https://startupweek.aseankorea.org/?utm_source=chatgpt.com.
- Botto, Kathryn. 2021. "South Korea Beyond Northeast Asia: How Seoul Is Deepening Ties With India and ASEAN | Carnegie Endowment for International Peace." <https://carnegieendowment.org/research/2021/10/south-korea-beyond-northeast-asia-how-seoul-is-deepening-ties-with-india-and-asean?lang=en>.
- Choi, Ina. 2020. "ASEAN Outlook on the Indo- Pacific (Aoip) and Korea's New Southern Policy." SSRN Scholarly Paper No. 3889166. Social Science Research Network, Maret 31. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3889166>.
- "Co-Chairs' Statement of The 2019 ASEAN-Republic of Korea Commemorative Summit." 2019. *ASEAN Main Portal*, November 26. <https://asean.org/co-chairs-statement-of-the-2019-asean-republic-of-korea-commemorative-summit/>.
- CONGRESS.GOV. t.t. "REGIONAL COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT SIGNED - Penelusuran Google." Diakses 26 Agustus 2025. <https://www.congress.gov/crs-product/IF11891>.
- De, Prabir. 2021. "Building Partnership with ASEAN and Korea's New Southern Policy: Views from India." SSRN Scholarly Paper No. 3820365. Social Science Research Network, Maret 19. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3820365>.
- Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Pemerintah Australia. t.t. "Forum Regional ASEAN (ARF) | Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Pemerintah Australia." Diakses 14 Agustus 2025. <https://www.dfat.gov.au/international-relations/regional-architecture/asean-regional-forum-arf>.
- Dermawan, Windy, dan Annisa Rohmaniah. 2019. "PERAN INDONESIA

- DALAM KERJASAMA ASEAN-KOREA SELATAN MELALUI ASEAN-KOREA CENTRE.” *JISPO Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 9 (1): 1. <https://doi.org/10.15575/jispo.v9i1.5716>.
- Dhanny, Rizky Alifa. t.t. “ASEAN-Regional-Forum (ARF.” *Academia*. Diakses 4 Juli 2025. https://www.academia.edu/32139098/ASEAN_Regional_Forum_ARF.
- Fayza, Niju, Anita Afriani Sinulingga, dan Inda Mustika Permata. 2022. “Upaya Diplomasi Publik Korea Selatan Dalam Menyebarkan Hallyu Di Amerika Serikat Pada Pemerintahan Moon Jae In.” *Frequency of International Relations (FETRIAN)* 4 (2): 59–97. <https://doi.org/10.25077/fetrian.4.1.24-62.2022>.
- Freedom House. 2021. “South Korea: Freedom in the World 2021 Country Report.” <https://freedomhouse.org/country/south-korea/freedom-world/2021>.
- GAVI the Vaccine Alliance. 2021. “Republic of Korea Pledges US\$ 200 Million to Support Lower-Income Economies through Gavi COVAX Advance Market Commitment.” <https://www.gavi.org/news/media-room/republic-korea-pledges-us-200-million-support-lower-income-economies-through-gavi>.
- Gunawan, Iwan. 2024. “Korean Cultural Diplomacy: Uniting Society Through Soft Power.” *Jurnal Info Sains : Informatika Dan Sains* 14 (01): 1079–86. <https://ejournal.seaninstitute.or.id/index.php/InfoSains/article/view/4262>.
- Ha, Hoang Thi. 2019. “Korea Finds in ASEAN a Like-Minded Partner on the Indo-Pacific.” *YUSOF ISHAK INSTITUTE*.
- Ha, Hoang Thi, dan Glenn Ong. 2020. *Singapore |30 January 2020 Assessing the ROK’s New Southern Policy towards ASEAN*. no. 2020.
- Indraswari, Ratih. 2022. “South Korea’s ASEAN Policy Today: The New Southern Policy and Its Standing.” *Korea Europe Review: An Interdisciplinary Journal of Politics* society (Juni): No. 2 (2022): Impossible Triangulation. <https://doi.org/10.48770/KER.2022.NO2.12>.
- Indraswari, Ratih, dan Eunwoo Joo. 2022. “Identification of New Southern Policy Narratives within ROK’s Digital Diplomacy toward ASEAN.” *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional* 18 (1): 74–87. <https://doi.org/10.26593/jihi.v18i1.5672.74-87>.
- Jaehyon, Lee. 2019. *Korea’s New Southern Policy: Motivations of ‘Peace Cooperation’ and Implications for the Korean Peninsula*. Asan Institute for Policy Studies. <https://www.jstor.org/stable/resrep20678>.
- Jaehyon, Lee. 2020. *New Emphasis Needed: South Korea’s New Southern Policy and ASEAN*. no. 2020.
- Kamaruddin, Nurliana, dan Aaron Denison Deivasagayam. 2023. “The NSP-K and NSP-K Plus: Elevating South Korea’s Middle Power Presence Among Asean Member Countries.” *Asian Affairs* 54 (2): 286–304. <https://doi.org/10.1080/03068374.2023.2213114>.
- Kamaruddin, Nurliana, dan Jan Vincent Galas. 2019. “The ASEAN-ROK Economic Relations: Challenges and Opportunities.” Dalam *ASEAN Post-50: Emerging Issues and Challenges*, disunting oleh Aida Idris dan Nurliana Kamaruddin. Springer. https://doi.org/10.1007/978-981-13-8043-3_3.
- Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. 2023. “Peringatan 50 Tahun Hubungan Indonesia – Korea: Tingkatkan Kerja

- Sama Untuk Kemakmuran Kawasan - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia.” www.ekon.go.id. <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/5276/peringatan-50-tahun-hubungan-indonesia-korea-tingkatkan-kerja-sama-untuk-kemakmuran-kawasan>.
- Keohane, Robert O. 1984. *After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy*. REV-Revised. Princeton University Press. <https://doi.org/10.2307/j.ctt7sq9s>.
- Kim, Youngwan, Sang-Hwan Lee, dan Young Jun Cho. 2023. “Donor motivation in the era of the COVID-19 crisis: Focusing on South Korean health diplomacy and response aid to COVID-19.” *International Area Studies Review* 26 (1): 71–86. <https://doi.org/10.1177/22338659231151409>.
- Korea Foundation. t.t. “한국국제교류재단 KF.” Diakses 26 Agustus 2025. <https://kf.or.kr/kfNewsletter/mgzinSubViewPage.do?mgzinSn=8784&mgzinSubSn=8813&langTy=ENG>.
- Lee, Chi-Dong. 2019. “Full Text of a Joint Declaration Adopted at Mekong-S. Korea Summit.” Yonhap News Agency, November 27. <https://en.yna.co.kr/view/AEN20191127004200315>.
- Lee, Kwon Hyung, dan Yoon Jae Ro. 2021. “The New Southern Policy Plus Progress and Way Forward.” *SSRN Electronic Journal*, advance online publication. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4062021>.
- Lee, Sohyun Zoe. 2023. “Middle Power and Power Asymmetry: How South Korea’s Free Trade Agreement Strategy with ASEAN Changed under the New Southern Policy.” *Contemporary Politics* 29 (3): 318–38. <https://doi.org/10.1080/13569775.2022.2146288>.
- Martinus, Melinda. 2020. *Singapore | 21 April 2020 ASEAN Smart Cities Network: A Catalyst for Partnerships*. no. 2020.
- Mateo, Janvic. 2020. “South Korea rolls out new policy to boost support for ASEAN.” Philstar.com. <https://www.philstar.com/headlines/2020/11/29/2060184/south-korea-rolls-out-new-policy-boost-support-asean>.
- Min-Hua, CHIANG. 2020. *SOUTH KOREA’S NEW SOUTHERN POLICY: MOTIVATIONS, IMPLEMENTATIONS AND IMPLICATIONS*.
- Ministry of Defence. t.t. “Singapore and Republic of Korea Navies Co-Host Maritime Security Exercise to Strengthen ADMM-Plus Cooperation.” Diakses 25 Agustus 2025. https://www.mindef.gov.sg/news-and-events/latest-releases/28apr19_nr/.
- Mission of the Republic of Korea to ASEAN. t.t.-a. “ASEAN-ROK Cooperation Fund.” Mission of the Republic of Korea to ASEAN. Diakses 14 Agustus 2025. <https://overseas.mofa.go.kr/asean-en/index.do>.
- Mission of the Republic of Korea to ASEAN. t.t.-b. “Mission of the Republic of Korea to ASEAN.” Mission of the Republic of Korea to ASEAN. Diakses 25 Agustus 2025. <https://overseas.mofa.go.kr/asean-en/index.do>.
- Nicolas, Françoise. 2021. *The Economic Pillar of Korea’s New Southern Policy: Building on Existing Assets*.
- Oskar Pietrewicz. 2021. “South Korea’s Growing Economic Involvement in Southeast Asia.”

- https://pism.pl/publications/South_Koreas_Growing_Economic_Involvement_in_Southeast_Asia#.
- Pasha, Auralia Salsabila Tuada, dan Arie Kusuma Paksi. 2022. "THE IMPACT OF SOUTH KOREA'S NEW SOUTHERN POLICY ON INDONESIA: ECONOMY AND DEFENSE SECTORS." *DIALEKTIKA: Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial* 7 (2): 140–50. <https://doi.org/10.36636/dialektika.v7i2.747>.
- Peng Er, Lam. 2023. *South Korea's New Southern Policy: A Middle Power's International Relations with Southeast Asia and India*. 1 ed. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003353133>.
- Pradityo, Rahmadanu. 2022. "South Korea's Interest in ASEAN+1: New Southern Policy and Peacebuilding." *Jurnal Sosial Politik* 8 (1): 134–49. <https://doi.org/10.22219/jurnalsospol.v8i1.18026>.
- Putra, Aldy Sugandi, dan Devita Prinanda. 2023. "Kepentingan Korea Selatan Dalam Kegiatan Perdagangan di Wilayah Asean Melalui Asean-Korean Free Trade Area (AKFTA)." *Dialektika : Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial* 8 (1): 162–74. <https://doi.org/10.36636/dialektika.v8i1.2292>.
- Rabena, Aaron Jed. 2021. "South Korea's New Southern Policy as an Open Regime: A View from Southeast Asia." SSRN Scholarly Paper No. 3881560. Social Science Research Network, Maret 31. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3881560>.
- Ravenhill, John. 1998. "Cycles of middle power activism: Constraint and choice in Australian and Canadian foreign policies." *Australian Journal of International Affairs* 52 (3): 309. <https://doi.org/10.1080/10357719808445259>.
- "Republic of Korea Opens Its Mission to ASEAN." 2012. *ASEAN Main Portal*, Oktober 29. <https://asean.org/republic-of-korea-opens-its-mission-to-asean/>.
- Ringga, Deti Sufendi Mahesa, Ria Nur Fadillah, dan Tumiri Ali. 2018. "Efektivitas ASEAN+3 dalam Pengakomodasian Kerja Sama Regional Asia Tenggara dan Asia Timur." *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan* 4 (2): 2. <https://doi.org/10.37058/jipp.v4i2.761>.
- "Special Update on the 2019 ASEAN-Republic of Korea (ROK) Commemorative Summit." 2020. *CARI ASEAN Research and Advocacy*. <https://cariasean.org/special-update-on-the-2019-asean-republic-of-korea-rok-commemorative-summit/>.
- Sungil Kwak. 2020. "Planning the Future of Korea's New Southern Policy | East-West Center | Wwww.Eastwestcenter.Org." Juli 16. <https://www.eastwestcenter.org/publications/planning-the-future-koreas-new-southern-policy>.
- The Jakarta Post. 2019. "Korean Wave in ASEAN Keeps Going Strong - World." The Jakarta Post. <https://www.thejakartapost.com/news/2019/04/25/korean-wave-in-asean-keeps-going-strong.html>.
- The Jakarta Post. 2020. "NSP+: Future Direction of ASEAN-Korea Strategic Partnership - Mon, November 30, 2020." The Jakarta Post. <https://www.thejakartapost.com/paper/2020/11/29/nsp-future-direction-of-asean-korea-strategic-partnership.html>.

- Thuzar, Moe. 2021. "The New Southern Policy Plus: What's New and What's Next?" SSRN Scholarly Paper No. 3820360. Social Science Research Network, Maret 19. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3820360>.
- Truong, Hoan Quang, Chung Van Dong, dan Hoang Huy Nguyen. 2019. "Determinants of Trade Flows and Trade Structure between Korea and ASEAN." SSRN Scholarly Paper No. 3360947. Social Science Research Network, Maret 30. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3360947>.
- United Nations Secretary-General. 2020. "Statement attributable to the Spokesperson for the Secretary-General - on ROK President Moon Jae-in's net-zero announcement." <https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2020-10-27/statement-attributable-the-spokesperson-for-the-secretary-general-rok-president-moon-jae-%E2%80%99s-net-zero-announcement>.
- Wongi, Choe. 2021. *"New Southern Policy": Korea's Newfound Ambition in Search of Strategic Autonomy*.
- Yoo, Jeong-Ho, Seul-Ki Park, dan In-Kyo Cheong. 2020. "The Impact of COVID-19 and Korea's New Southern Policy on Its Global Value Chain." *Journal of Korea Trade* 24 (8): 19–38. <https://doi.org/10.35611/jkt.2020.24.8.19>.
- Yun, Sera, dan Jan Vincent Galas. 2023. "The Evolution of South Korea's New Southern Policy (NSP-K): The Moon and Yoon Administrations." *Asian Affairs* 54 (2): 250–63. <https://doi.org/10.1080/03068374.2023.2213113>.
- "한국국제교류재단 KF." t.t. Diakses 26 Agustus 2025. <https://www.ach.or.kr/acheng/cm/cntnts/cntntsView.do?cntntsId=1602&mi=2066&>.